



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

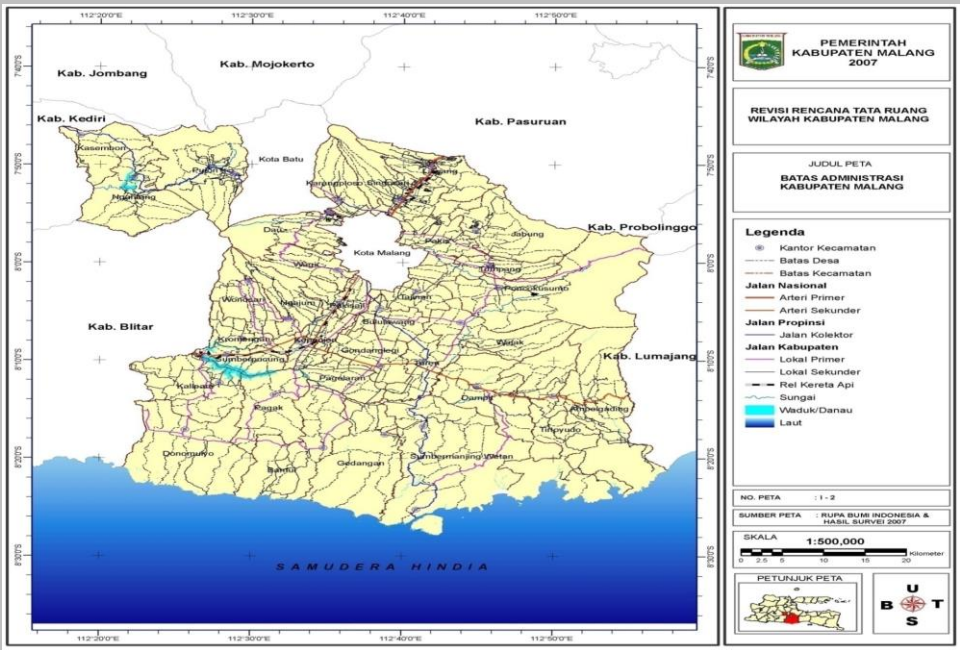
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi

1. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90"-112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Malang



Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

2. Kondisi Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2014 sebesar 2.527.087 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,73% per tahun terdiri dari laki-laki 1.269.613 (50,25%) 1.257.474 (49,75%) dengan rata-rata kepadatan 780 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2014 adalah sebesar 3.092.714 jiwa terdiri dari laki-laki 1.549.678 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.543.036 jiwa (49,90%).

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

3. Potensi Unggulan Daerah

a. Potensi Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

b. Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.

Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

c. Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan menembus

pasar ekspor di kawasan Eropa dan Jepang. Dengan kondisi tersebut maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

d. Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.

e. Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

f. Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

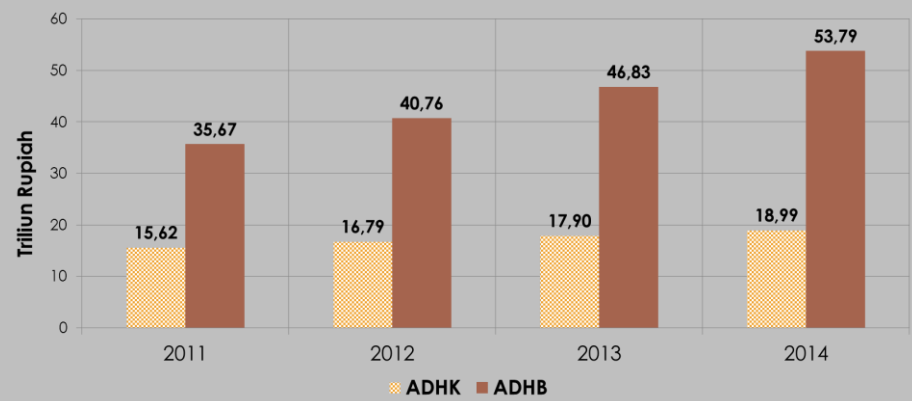
Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi. Pembangunan di Kabupaten Malang pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah Tahun 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Malang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015 dengan visi: *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing* atau **MADEP MANTEB** dengan misi: 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya. 2) Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan

yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. 3) Mewujudkan supremasi hukum dan HAM. 4) Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 7) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Kedelapan butir Misi Kabupaten Malang, semata-mata untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

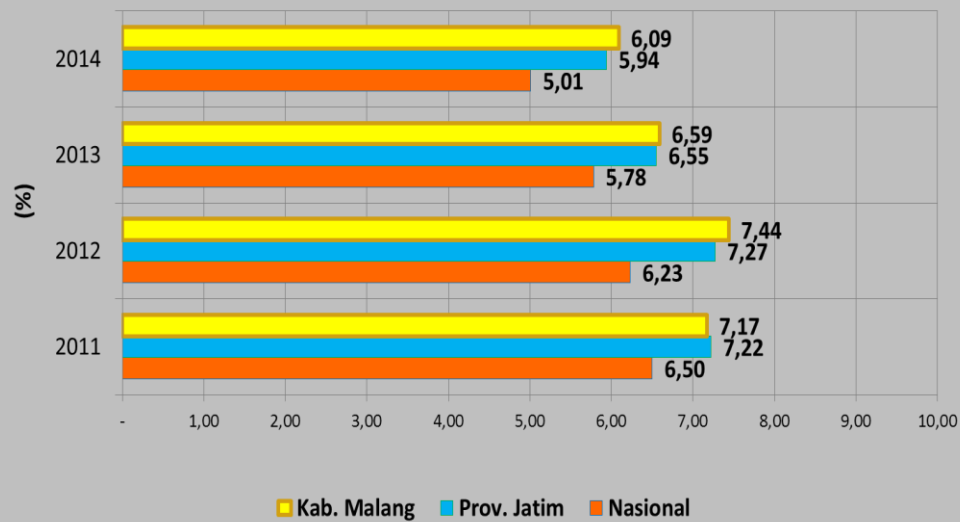
a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Secara umum kondisi makro ekonomi Kabupaten Malang, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal itu tidak lepas dari kondisi fundamental makro yang mempengaruhi seperti stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di tahun ini. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan; yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi pada *trend* perekonomian Kabupaten Malang dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Gambar 2.2
**Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2011-2014
Kabupaten Malang**



Gambar 2.3
**Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang terhadap
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2014**



b. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan angka rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Malang, dengan mata pencahariannya terdiri dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya; yang penghasilan riilnya tidak sama bahkan sebagian besar

atau lebih kurang 40% masyarakat Kabupaten Malang bekerja di sektor pertanian primer.

Gambar 2.4
Grafik Pendapatan Perkapita PDRB ADHB Tahun 2011-2014 Kabupaten Malang



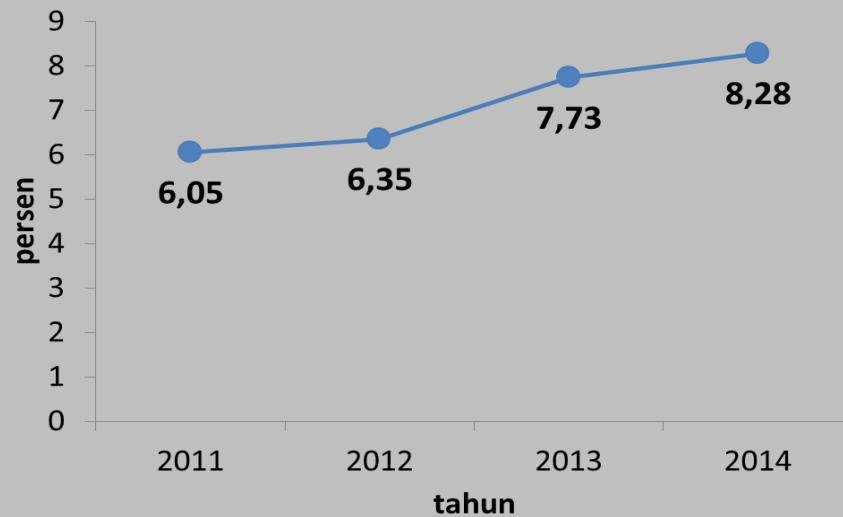
Sumber: BPS Kabupaten Malang

c. Tingkat Inflasi

Angka inflasi sektoral PDRB sebagai indikator utama stabilitas perekonomian cenderung meningkat namun tetap terkendali. Pada tahun 2013 sebesar 7,73% pada tahun 2014 menjadi 8,28%. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh adanya pengaruh eksternal dan bersifat makro nasional seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar, tarif dasar listrik, dan anomali cuaca, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya.

Berikut gambaran keadaan tingkat inflasi dari tahun 2011-2014 adalah:

Gambar 2.5
**Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2011-2014
Kabupaten Malang**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

2. Kesejahteraan Sosial

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan

pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, 2) pemerataan pendidikan dasar, 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi tingkat kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas.

Dalam mengupayakan kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tujuan yakni menurunkan secara sistematis dan signifikan angka kemiskinan dan desa tertinggal serta bersamaan dengan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat rentan miskin. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik angka kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar 11,44% atau di bawah angka kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% dan Nasional sebesar 11,47%. Untuk tahun 2014, data resmi dari Badan Pusat Statistik belum dipublikasi, namun diharapkan tetap dapat diturunkan melalui program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Malang diperkirakan mampu mencapai

penurunan tingkat kemiskinan hingga berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Sedangkan untuk desa tertinggal sampai akhir tahun 2014 masih berjumlah 16 desa dari 110 desa pada tahun 2010, yang akan dituntaskan melalui kegiatan pembangunan yang terfokus pada desa miskin, dalam rangka pemberdayaan dan penguatan sarana dan prasarana perdesaan.

b. Perlindungan Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS; 3) masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas

maupun secara kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran, korban bencana/bencana alam; 4) serta belum efektifnya penanganan bencana baik yang bersifat preventif, tanggap darurat maupun rehabilitatif.

Penanganan PMKS pada tahun 2013 sebanyak 33.780 PMKS atau 19,99% dan tahun 2014 sebanyak 146.010 PMKS atau 86,30% dari 169.000 total PMKS yang ada. Sedangkan partisipasi sosial masyarakat dalam PMKS di tahun 2013 sebesar 3% dari total PMKS yang ada setiap tahunnya, dan tahun 2014 meningkat sebesar 3,5%. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup penyandang cacat telah dilakukan peningkatan ketrampilan dan keahlian, yaitu pada tahun 2013 sejumlah 30 orang dan tahun 2014 sejumlah 80 orang. Sementara bantuan pengembangan usaha dan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang cacat pada tahun 2013 sejumlah 57 orang dan pada tahun 2014 sejumlah 80 orang

c. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Malang dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas). Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut gambaran IPM Kabupaten Malang selama 4 tahun terakhir.

Tabel 2.5
Gambaran IPM Kabupaten Malang

URAIAN	2011	2012*)	2013
Indeks Kesehatan	73,72	74,16	74,59
Indeks Pendidikan	75,31	75,60	76,03
Indeks Daya Beli	64,49	65,06	66,02
IPM Kab. Malang	71,17	71,61	72,21

Sumber : BPS Kabupaten Malang
Ket : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya-tidaknya selama 9 Tahun.

Untuk mendukung Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan

kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2014 telah tersedia 28 SD-SMP Satu Atap, selain itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan telah dilaksanakan pula kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP, SMA/SMK Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan.

Dilihat dari hasil ujian nasional dan ujian sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA baik Negeri maupun Swasta, tingkat kelulusan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun ajaran 2013/2014, tingkat kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sangat menggembirakan. Angka kelulusan jenjang SD/MI tahun 2013 sebesar 100% dan pada tahun 2014 dipertahankan sebesar 100%, SMP/MTs tahun 2013 sebesar 99,99% dan pada tahun 2014 menjadi 100%. Tingkat SMA/MA tahun 2013 sebesar 99,90% dan untuk tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,07% menjadi 99,97%. Sedangkan pada jenjang SMK pada tahun 2013 kelulusan sebesar 100% dan tahun 2014 dapat dipertahankan 100%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu prosentase jumlah siswa dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APK PAUD pada tahun 2013 sebesar 62,27% dan pada tahun 2014 sebesar 78,73%, APK SD/MI pada tahun 2013 sebesar 113,19%, tahun 2014 menjadi sebesar 113,17%. APK SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 96,41%, dan tahun 2014 menjadi 96,43%. APK SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 55,62%, tahun 2014 menjadi 59,34%.

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu prosentase jumlah siswa usia sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APM SD/MI pada tahun 2013 sebesar 99,29%, tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 99,32%. APM SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 79,80%, dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 79,83%. APM SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 44,51% dan tahun 2014 meningkat menjadi 47,38%. Capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan di masa mendatang melalui kerja keras bersama terutama untuk jenjang SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja

menunjukkan peningkatan, pada tahun 2013 sebanyak 9.066 lulusan dan tahun 2014 sebanyak 9.906 lulusan atau meningkat 9,27%.

2. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan.

Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan optimalisasi fungsi 39 puskesmas, menyiagakan 93 puskesmas pembantu, 58 puskesmas keliling, 14 ambulans serta melakukan penguatan terhadap 2.816 posyandu, dan peningkatan status polindes menjadi ponkesdes untuk dikukuhkan masing-masing pada 390 desa/kelurahan siaga. Pada tahun 2013 telah dilakukan pengembangan dan rehabilitasi RSUD Lawang, rehabilitasi 13 puskesmas beserta fasilitas pengolahan air limbah untuk 30 puskesmas, 3 rumah dinas dokter, 31 puskesmas Pembantu dan 2 ponkesdes. Tahun 2014 dilanjutkan dengan peningkatan status RSUD Lawang dari tipe D menjadi tipe C sekaligus penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap, rehabilitasi 20 puskesmas, 44 puskesmas pembantu dan pembangunan laboratorium kesehatan beserta fasilitas pengolahan air limbahnya

Adapun indikator kinerja lain bidang kesehatan antara lain adalah Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup, dan tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup. Kenaikan AKB ini berdasarkan hasil evaluasi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga mulai tahun 2015 ini sedang digiatkan upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas di lapangan. Sedangkan angka

kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 sebesar 94,52 per seratus ribu kelahiran hidup, pada tahun 2014 turun menjadi 62,28 per seratus ribu kelahiran hidup. Prosentase balita dengan status gizi kurang pada tahun 2013 sebanyak 0,92%, dan pada tahun 2014 turun menjadi 0,87%. Dilihat dari indikator kecamatan bebas rawan gizi, pada tahun 2013 sudah mencapai 100% dan tahun 2014 dapat dipertahankan tetap 100%.

Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi kinerja dari pelaksanaan program-program bidang kesehatan, yang antara lain dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang penilaiannya merupakan otoritas dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, bahwa IPKM Kabupaten Malang sampai tahun 2013 sebesar 68,97, naik bila dibandingkan tahun 2007 sebesar 54,08. Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar 69,70 dan pada ta

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang kesehatan di samping dari sentuhan melalui program-program pemerintah, juga yang paling dominan adalah semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesehatan mandiri. Tingginya tingkat kesadaran dimaksud antara lain dapat dilihat dari data BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, untuk cakupan jaminan kesehatan penduduk Kabupaten Malang sampai akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 1.478.008 orang atau 58,48% dari jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik.

3. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Peningkatan pelayanan KTP dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan

pelayanan melalui teknologi infomatika dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), pada tahun 2013 telah dilayani perekaman biometrik sebanyak 1.700.817 orang dari kuota 1.693.955 orang atau 100,41% dan telah didistribusikan kepada masyarakat sebanyak 1.628.908 keping, kemudian pada akhir tahun 2014 telah dilakukan perekaman biometrik sebanyak 47.357 orang atau secara kumulatif yang telah dilakukan perekaman biometrik KTP-el sebanyak 1.713.763 orang dan telah terdistribusikan sebanyak 1.629.930 keping. Untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2013 sebanyak 887.122 KK, dan tahun 2014 menjadi 902.800 KK atau meningkat 1,77%. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain karena upaya perbaikan pelayanan, dan terutama dari kesadaran masyarakat sendiri yang bertambah. Sedangkan untuk penerbitan akta kelahiran tahun 2013 sebanyak 60.986 kutipan dan tahun 2014 sebanyak 59.183 kutipan.

4. Keluarga Berencana

Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini meliputi: pemberdayaan keluarga termasuk langkah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; promosi dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja; promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang difokuskan kepada peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, terutama bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I); serta penguatan kelembagaan agar secara bertahap program KB dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri.

Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur pada tahun 2013 sebanyak 522.800 pasangan, selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 521.995 pasangan atau turun 0,15%. Sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2013 sebesar 401.087 akseptor atau 76,70% dan tahun 2014 sebanyak 397.748 akseptor atau 76,20%, yang penurunannya disebabkan terutama kepesertaan PUS secara mandiri dalam program KB atau menggunakan jasa medis non-pemerintah sehingga tidak terekam dalam basis data. Untuk tingkat kelahiran tahun 2013 sebanyak 2,20% dan tahun 2014 menurun sebesar 2,15%.

5. Investasi

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi.

Total investasi dalam kerangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2013 sebesar Rp.6.326.277.000.000,-. dan tahun 2014 total nilai investasi meningkat menjadi Rp.6.346.277.158.745,- atau naik 0,32%. Penambahan nilai penanaman modal dimaksud memberikan dampak untuk penyerapan tenaga kerja, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 24.802 orang yang diserap oleh PMA/PMDN, sedangkan pada tahun 2014 menyerap tenaga kerja sebanyak 25.052 orang. Untuk nilai investasi sektor industri formal pada

tahun 2013 sebesar Rp.2.684.923.643.000,- dan tahun 2014 mencapai Rp.2.729.225.460.000,- meningkat Rp.44.301.817.000,- atau 1,65%.

6. Pariwisata

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan dengan kunjungan pada tahun 2013 sebanyak 2.384.478 orang terdiri dari 2.362.584 orang wisatawan nusantara dan 21.895 orang wisatawan mancanegara. Tahun 2014 menjadi 2.905.536 orang atau naik 21,85%, yang terdiri dari 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang wisatawan mancanegara. Untuk pengembangan wisata budaya dapat dilakukan melalui pembinaan seni budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri. Dalam rangka peningkatan destinasi pariwisata utamanya wisata alam, maka telah dan sedang dikembangkan konsep pariwisata berbasis ekologi yaitu Taman Buah Jeru Tumpang, kampung Ekowisata Desa Bendosari Kecamatan Pujon, Wisata Mangrove di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo.

7. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 105.651 orang, menjadi 107.121 orang pada tahun 2014 atau meningkat 1,39%. Pada industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 54.571 orang dan pada tahun 2014 menjadi 55.116 orang atau bertambah sebesar 1%. Sedangkan dalam kerangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tenaga kerja yang terserap pada tahun 2013 sebanyak 24.802 orang sedangkan pada tahun 2014 menyerap tenaga kerja sebanyak 25.052 orang.

Disamping itu telah dilakukan peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, pada tahun 2013 telah dilakukan pelatihan sebanyak 26 kali dengan peserta 970 orang, dan tahun 2014 sebanyak 11 kali untuk 900 orang. Selain itu untuk program transmigrasi melalui peningkatan ketrampilan bagi calon transmigran, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 60 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 25 orang. Sedangkan jumlah transmigran yang telah ditempatkan pada tahun 2013 sebanyak 23 KK, kemudian tahun 2014 sebanyak 5 KK.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, telah dilaksanakan pembinaan kepada perusahaan dengan hasil menurunnya kasus pelanggaran. Pada tahun 2013 terjadi 75 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2014 turun menjadi 53 kasus, serta 6 perusahaan telah mengalami *zero accident*.

8. Pertanian

Potensi pertanian di Wilayah Kabupaten Malang beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao, kelapa. Untuk komoditi sayuran, terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, klengkeng, salak Swaru, ketela gunung kawi.

Produksi padi, yang pada tahun 2013 mencapai 461.291 ton, dan pada tahun 2014 sebesar 461.306 ton. Produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan vanili, dengan total produksi tahun 2013 sebanyak 441.601 ton, dan pada tahun 2014 menjadi 442.175 ton atau naik 0,13%. Untuk produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir pada tahun 2013 sebanyak 327.771 ton, dan tahun 2014 sebanyak 328.197 ton atau naik 0,13%. Selanjutnya pendapatan perkapita petani tanaman pangan pada tahun 2014 mencapai

Rp.11.917.181,- sedangkan pendapatan petani tanaman perkebunan sebesar Rp.13.901.517,- .

Bidang Peternakan setiap tahunnya terjadi peningkatan produk-produk peternakan, yang dapat dilihat dari peningkatan produksi daging, susu dan telur, serta pendapatan peternak itu sendiri. Populasi sapi potong tahun 2013 sebesar 189.145 ekor pada tahun 2014 meningkat menjadi 199.453 ekor atau sebesar 5,45%. Peningkatan ini didukung oleh keberhasilan program Inseminasi Buatan (IB) yang dilihat dari jumlah kelahiran dari hasil IB sapi potong pada tahun 2013 sebanyak 57.382 ekor dan pada tahun 2014 menjadi 58.831 ekor atau meningkat 2,53%. Jika diasumsikan harga anak sapi lepas sapih senilai Rp.5.000.000,- per ekor, maka nilai tambah yang diukur dari total pendapatan peternak sapi potong yang mengikuti program IB di Kabupaten Malang pada tahun 2014 mencapai Rp.294.155.000.000,-. Sedangkan untuk populasi sapi perah pada tahun 2013 sebanyak 72.217 ekor dan di tahun 2014 menjadi 75.683 ekor atau mengalami kenaikan sebesar 4,80%. Populasi kambing dan domba tahun 2013 sebanyak 255.766 ekor, pada tahun 2014 sebanyak 266.617 ekor atau meningkat 4,24%. Populasi unggas yang terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan entok pada tahun 2013 sebanyak 21.426.071 ekor dan pada tahun 2014 menjadi 23.285.809 ekor atau meningkat 8,68%.

Dari populasi tersebut, Kabupaten Malang telah berswasembada produk-produk peternakan berupa daging, susu dan telur. Adapun produksi daging sapi, kambing dan unggas pada tahun 2013 mencapai 21.866,55 ton dan tahun 2014 sebanyak 22.325,74 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 2,10%. Produksi telur tahun 2013 sebesar 25.080,21 ton dan pada tahun 2014 menjadi 27.510,13 ton atau mengalami kenaikan sebesar 9,69%. Produksi susu pada tahun 2013 sebesar 116.033,57 ton dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 117.235,67 ton atau terjadi kenaikan sebesar 1,04%.

Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas berdampak pada peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini dapat

dilihat dari beberapa komoditas pangan utama yang menunjukkan kondisi surplus yaitu: surplus beras sebesar 71.409 ton, surplus jagung 225.799 ton, surplus ubi kayu 238.573 ton, surplus gula 269.996 ton, dan surplus daging 16.348 ton, serta surplus susu 101.912 ton.

9. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari total produksi perikanan pada tahun 2013 sebesar 28.019,45 ton yang meliputi produksi ikan tangkap sebesar 10.949,29 ton dan budidaya sebesar 17.070,16 ton. Pada tahun 2014 total produksi perikanan sebesar 30.633,51 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 11.077,66 ton dan ikan hasil budidaya sebesar 19.555,84 ton atau secara keseluruhan naik 9,33%. Sedangkan untuk produksi olahan ikan pada tahun 2013 sebesar 5.856,22 ton pada tahun 2014 sebesar 6.355,75 ton atau meningkat 8,53%.

Pendapatan perkapita nelayan pada tahun 2013 mencapai Rp.24.625.000,- kemudian pada tahun 2014 menjadi Rp.25.158.000,- atau meningkat 2,16%. Untuk pendapatan perkapita pembudidaya perikanan pada tahun 2013 sebesar Rp.14.717.700,- dan pada tahun 2014 menjadi Rp.16.687.155,- atau meningkat 13,38%. Sementara pendapatan perkapita pengolah ikan pada tahun 2013 sebesar Rp.18.144.532,- pada tahun 2014 menjadi Rp.19.143.000,- atau meningkat 5,50%. Peningkatan pendapatan dimaksud antara lain dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2013 sebesar 21,47 kg perkapita per tahun, dan pada tahun 2014 menjadi 22,85 kg perkapita per tahun atau meningkat sebesar 6,43%.

10. Industri dan Perdagangan

Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain unit usaha industri pada tahun 2013 sebanyak 21.895 unit usaha dan tahun 2014 menjadi 22.234 unit usaha, atau meningkat 1,55%. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal, sektor formal tahun 2013

sebanyak 1.767 unit usaha, dan pada tahun 2014 menjadi 1.804 unit usaha, atau meningkat 2,09%. Sedangkan pada industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 20.128 unit dan pada tahun 2014 menjadi 20.430 unit atau meningkat 1,50%.

Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2013 sebanyak 19.495 perusahaan dan tahun 2014 secara kumulatif menjadi sebanyak 20.598 perusahaan atau meningkat 5,66%. Nilai ekspor pada tahun 2013 sebesar US\$.338.273.135,89 pada tahun 2014 menjadi US\$.345.541.449,41 atau meningkat 2,15%. Selanjutnya nilai impor pada tahun 2013 sebesar US\$.71.671.674,94 dan pada tahun 2014 sebesar US\$.76.000.142,85 atau naik 6,04%. Dengan demikian, angka neraca perdagangan selama tahun 2014 mengalami surplus US\$.269.541.306,56.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar.

Jalan di wilayah Kabupaten Malang tahun 2014 yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 115,63 km dengan kondisi cukup baik, jalan provinsi sepanjang 110,12 km juga dalam kondisi baik. Untuk jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pada tahun 2014 telah ditingkatkan sepanjang 160 km, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan pada sepanjang 450 km dan pemeliharaan berkala sepanjang 284 km. Jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2013 sepanjang 1.465,67 km atau 87,83% dan pada tahun 2014 naik menjadi 1.550,78 km atau 92,93%.

Peningkatan jembatan sesuai standar di tahun 2013 sepanjang 468 m, pada tahun 2014 menjadi 736 m atau meningkat 268 m. Dari sisi kuantitas, total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah, yang memenuhi standar di tahun 2013 sebanyak 138 buah atau 34,94% dan pada tahun 2014 menjadi 157 buah atau naik 39,75%.

Selain kinerja penanganan jalan dan jembatan kabupaten sebagaimana yang disebutkan di atas, maka juga dilakukan penanganan jalan desa di Kabupaten Malang yang tercatat sepanjang 6.907,90 km. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan penanganan sepanjang 320 km melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan infrastruktur perdesaan. Sehingga kondisi jalan desa yang berkategori baik pada tahun 2013 sepanjang 4.358,71 km atau 63,10% dan pada tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km atau 64,78%.

Dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta mobilitas orang antar wilayah, maka selain perbaikan sarana dan prasarana jalan, juga dilakukan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor. Pengawasan dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas bagi kendaraan wajib uji agar layak jalan. Pada tahun 2013 telah dilakukan terhadap 44.931 kendaraan wajib uji yang lulus dan pada tahun 2014 sebanyak 47.507 kendaraan wajib uji yang lulus atau naik sebesar 5,73%.

Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan, dimana tahun 2013 terdapat

fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, *warning light*, *traffic light*, sejumlah 7.912 unit dan pada tahun 2014 menjadi 8.069 unit, atau naik 1,98%. Selain itu, untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat marka jalan yang pada tahun 2013 seluas 34.026 m² dan untuk tahun 2014 menjadi seluas 37.576 m² atau naik 10,43%

Pesatnya kebutuhan transportasi udara khususnya bagi masyarakat Kabupaten Malang dan sekitarnya, dapat dilihat dari lonjakan penumpang dimana pada tahun 2013 jumlah penumpang angkutan udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sebanyak 526.036 orang, dan cargo seberat 1.685.417 kg. Pada tahun 2014 jumlah penumpang menjadi 626.638 orang atau mengalami kenaikan 19,12% dan cargo seberat 2.184.441 kg atau mengalami kenaikan 29,61%. Dari sisi frekuensi penerbangan sipil selama tahun 2014, Bandara Abdulrachman Saleh melakukan 5.638 kali penerbangan yang dilayani oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia 1.410 kali, Sriwijaya Air 2.486 kali, Wings Air 688 kali, Citilink 724 kali, dan Kalstar Air 330 kali.

b. Ketersediaan Sarana Komunikasi

Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak bermunculan warung telekomunikasi (wartel) swasta. Jumlah telepon umum koin dari tahun ke tahun semakin berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang

menunjukkan jumlah pelanggan telepon semakin meningkat dari tahun ke tahun.

c. Ketersediaan Lembaga Keuangan

Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain, BRI, BNI'46 dan bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.

d. Listrik Perdesaan

Kebutuhan energi listrik sangat penting bagi masyarakat khususnya wilayah yang belum terjangkau PLN. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Malang pada tahun 2013 sebanyak 567.468 KK atau sebesar 85,40% dan tahun 2014 sebanyak 581.089 KK atau 87,45% meningkat 2,05%. Untuk pengembangan energi terbarukan telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga air sebanyak 7 unit, mikro hidro sebanyak 6 unit, dan tenaga surya 1.284 titik untuk penerangan rumah dan jalan di daerah terpencil. Sedangkan untuk biogas pada tahun 2013 telah dibangun sebanyak 5.393 unit biodigester, tahun 2014 sebanyak 5.692 unit biodigester atau meningkat 5,54%.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasinya

2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Program-program yang dilaksanakan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Non Formal; 5) Program Pendidikan Luar Biasa;

6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.61.566.148.980,- dan terealisasi sebesar Rp.57.404.268.116,- sisa sebesar Rp.4.161.880.864,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut

- 1) Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI sebesar 100%, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 99,99% meningkat sebesar 100% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2013 sebesar 99,90% meningkat sebesar 99,94% di tahun 2014, serta dipertahankannya angka kelulusan tingkat SMK sebesar 100%;
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2013 sebesar 113,19% menurun sebesar 109,80% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 96,41% menurun sebesar 96,39% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 55,62% meningkat sebesar 59,34% di tahun 2014;
- 3) Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2013 sebesar 99,29% meningkat sebesar 99,32% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 79,80% meningkat sebesar 79,83% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 44,51% meningkat sebesar 47,38% di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja pada tahun 2013 sebanyak 9.066 siswa meningkat sebanyak 9.906 siswa di tahun 2014;
- 5) Angka Putus Sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2013 sebesar 0,13% menurun sebesar 0,09% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMP pada tahun 2013 sebesar 0,56% meningkat sebesar 0,75% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK pada tahun 2013 sebesar 0,94% menurun sebesar 0,30% di tahun 2014;
- 6) Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa, pada tahun 2013

sebanyak 22 kegiatan lomba di tahun 2013 dan sebanyak 23 kegiatan lomba di tahun 2014;

2. Urusan Kesehatan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Non Formal; 5) Program Pendidikan Luar Biasa; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Alokasi anggaran sebesar Rp.61.566.148.980,- dan terealisasi sebesar Rp.57.404.268.116,- sisa sebesar Rp.4.161.880.864,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup, pada tahun 2013 sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup menjadi 6,09 per seribu kelahiran hidup di tahun 2014;
- 2) Persentase balita kurang gizi, pada tahun 2013 sebesar 4,6%, menjadi 5,52% di tahun 2014;
- 3) Dipertahankannya persentase kecamatan bebas rawan gizi sebesar 100%;
- 4) Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup, pada tahun 2013 sebesar 94,52 per seratus ribu kelahiran hidup, turun menjadi 62,28 per seratus ribu kelahiran hidup di tahun tahun 2014;
- 5) Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 69,87 yang artinya anak yang lahir di Kabupaten Malang mempunyai harapan untuk hidup hingga mencapai usia 69,87 tahun;
- 6) Meningkatnya pengawasan Obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan (OMKA) diwilayah Kecamatan;
- 7) Persentase Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer;
- 8) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan keluarga miskin dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;

- 9) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam;
- 10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
- 11) Persentase tersedianya obat sesuai kebutuhan;
- 12) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan meliputi :
 - a. Pengunjung rumah sakit tahun 2014 sebanyak 83.579 orang rawat inap dan 13.260 orang pengunjung rawat jalan;
 - b. Tingkat hunian rumah sakit/BOR (*Bed Occupation Rate*) masuk dalam rentang BOR efektif standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu sebesar 70,95%, dengan rincian sebagai berikut:
 - BOR kelas I : 69,09%
 - BOR kelas II : 70,69%
 - BOR kelas III : 65,19%
 - BOR VIP : 84,71%
 - c. Terealisasinya lingkungan rumah sakit sehat, aman dan terpelihara, sesuai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya, dimana dari hasil pemeriksaan kualitas lingkungan secara umum memenuhi standar baku mutu yang ditentukan, dengan indikator pemeriksaan antara lain:
 - Air, udara, swab peralatan steril, linen, lantai, peralatan makan pasien, AC dan uji kualitas makanan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;
 - Pemeriksaan limbah dilaksanakan setiap bulan, dengan hasil akhir memenuhi standar baku mutu limbah cair untuk kegiatan rumah sakit sesuai SK Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013.
 - d. Indek kepuasan masyarakat: 76,46% dengan kriteria baik, dilaksanakan metode pengukuran survei dengan menggunakan kuisioner dalam satu bulan sekali;
 - e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan standar mutu pelayanan ISO 9001:2008 dengan

terlaksananya surveillance audit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan hasil tersertifikasi. Persiapan akreditasi rumah sakit versi 2012 oleh tim KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit).

- 13) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang meliputi :
 - a. IGD dengan hasil jumlah pengunjung tahun 2014 adalah 6.973 orang dengan persentase 64,99% pengunjung umum, 35,01% pengunjung peserta BPJS;
 - b. Rawat jalan hasil jumlah kunjungan tahun 2014 adalah 34.223 dengan persentase 68,71% kunjungan umum, 31,29% kunjungan BPJS, semua ini tersebar di 8 poli yaitu: poliparu, gigi, anak, kandungan, mata, bedah, dalam dan poli konsultasi gizi;
 - c. Rawat inap jumlah pengunjung di tahun 2014 ini adalah 5.526 orang dengan persentase pengunjung umum 51,90% dan pengunjung BPJS 48,09%;
 - d. Terealisasinya lingkungan rumah sakit sehat, aman dan terpelihara, dimana dari hasil kualitas lingkungan secara umum meliputi standar pelayanan pemeriksaan limbah dilakukan 2 kali dalam setahun dengan hasil cukup baik;
 - e. Terealisasinya kepuasan pasien/keluarga dan pengunjung rumah sakit terhadap pelayanan pada tahun 2013 sebesar 78% menjadi 83,29% di tahun 2014.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 8) Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 9) Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 13) Program Pengendalian Banjir; 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan 15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Alokasi anggaran sebesar Rp.614.075.059.436,- dan terealisasi sebesar Rp.610.203.242.031,- sisa sebesar Rp.3.871.817.405,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada tahun 2013 sepanjang 1.465,63 km/87,83% menjadi 1.550,78 km/92,93% di tahun 2014 dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km;
- 2) Meningkatnya jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar dengan lebar 6 m, pada tahun 2013 sebanyak 138 buah atau 34,94%, menjadi 157 buah/39,75% di tahun 2014 dari total jumlah jembatan kabupaten yang ada sebanyak 395 buah;
- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan umum, pada tahun 2013 sebanyak 13.081 titik lampu, menjadi sebanyak 13.556 titik lampu di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya bangunan pelengkap jalan, pada tahun 2013 telah terbangun dinding penahan jalan sepanjang 540 m yang tersebar di 37 lokasi, dan telah terbangun pula dinding penahan sepanjang 240 m yang tersebar di 22 lokasi di tahun 2014, sehingga total panjang dinding penahan yang telah terbangun sepanjang 8.103 m;
- 5) Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan, pada tahun 2013 pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 36.695 sambungan rumah, sehingga masyarakat perkotaan yang telah dapat dilayani sebanyak 398.315 jiwa, di tahun 2014 terjadi kenaikan pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 88.723 sambungan rumah sehingga untuk masyarakat perkotaan yang telah dapat dilayani sebanyak 444.614 jiwa;

- 6) Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan, pada tahun 2013 pelayanan untuk masyarakat perdesaan sebanyak 13.500 jiwa, sehingga masyarakat perdesaan yang telah dapat dilayani sebanyak 647.142 jiwa, di tahun 2014 terjadi kenaikan pelayanan untuk masyarakat perdesaan sebanyak 21.350 jiwa, sehingga masyarakat perdesaan yang telah dapat dilayani sebanyak 668.492 jiwa;
- 7) Akses masyarakat Kabupaten Malang terhadap air bersih baik melalui sistem perpipaan, mata air, dan sumur gali pada tahun 2013 telah mencapai 93,8% meningkat menjadi 94,7% di tahun 2014;
- 8) Terwujudnya upaya dalam memperbaiki kualitas air melalui peningkatan pelayanan dibidang air limbah domestik lewat program-program penyediaan sarana dan prasarana air limbah seperti pembangunan MCK, Jamban Keluarga, Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus adapun cakupan pelayanan air limbah domestik pada tahun 2013 mencapai 71,9% dengan total penambahan cakupan pelayanan air limbah sejumlah 14.700 jiwa rumah tangga, menjadi 72,25% dengan total penambahan cakupan pelayanan air limbah sejumlah 10.715 jiwa rumah tangga di tahun 2014;
- 9) Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan agar masyarakat mudah untuk beraktifitas, pada tahun 2013 telah dibangun dan dilakukan peningkatan jalan lingkungan permukiman sepanjang 449 km, dilanjutkan sepanjang 86,68 km di tahun 2014. Dimana total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Malang sepanjang 5.474,86 km yang harus terus dijaga kondisinya oleh masyarakat dan didukung dari pemerintah;
- 10) Penanganan drainase lingkungan permukiman, pada tahun 2013 dibangun sepanjang 105,45 km, dan dilanjutkan sepanjang 26 km di tahun 2014 dari total panjang drainase lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Malang sepanjang 4.820,96 km;
- 11) Meningkatnya luas lahan yang terairi, pada tahun 2013 seluas 45.885,50 ha, meningkat seluas 46.050,50 ha di tahun 2014;

- 12) Meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, pada tahun 2013 kondisi baik sepanjang 517.956,91 m atau 58,34%, meningkat sepanjang 557.973,98 m atau 62,85% di tahun 2014, dimana total panjang saluran irigasi kewenangan Dinas Pengairan Kabupaten Malang (saluran primer dan sekunder) sepanjang 887.751,30 m;
- 13) Meningkatnya kondisi baik dam, pada tahun 2013 kondisi baik sebanyak 174 buah atau 44,16%, meningkat sebanyak 195 buah atau 49,49% di tahun 2014, dimana total dam sebanyak 394 buah;
- 14) Meningkatnya kondisi baik bangunan air, pada tahun 2013 kondisi baik sebanyak 3.172 buah atau 70,72%, meningkat sebanyak 3.251 buah atau 72,48% di tahun 2014, dimana total bangunan air sebanyak 4.485 buah;
- 15) Meningkatnya kondisi baik pintu air, pada tahun 2013 kondisi baik sebanyak 888 buah atau 70,36%, meningkat sebanyak 988 buah atau 78,28% di tahun 2014, dimana total pintu air sebanyak 1.262 buah;

4. **Urusan Perumahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perumahan adalah 1) Program Pengembangan Perumahan; 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan; 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman; dan 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Alokasi anggaran sebesar Rp.13.221.028.800,- dan terealisasi sebesar Rp.4.094.154.100,- sisa sebesar Rp.9.126.874.700,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada tahun 2013 sebanyak 1.197 unit dari yang ditargetkan sebanyak 1.230 unit, dan dilanjutkan sebanyak 847 unit dari yang ditargetkan sebanyak 864 unit di tahun 2014;
- 2) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk keluarga miskin dan MBR, pada tahun 2013 sebanyak 35.528 unit menjadi sebanyak 36.375 unit di tahun 2014;

- 3) Semakin meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan yang ditandai dengan perubahan fisik bangunan kumuh menjadi tidak kumuh melalui program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK), pada tahun 2013 sebanyak 11 lokasi berupa pembangunan MCK Komunal, dilanjutkan sebanyak 27 lokasi berupa pembangunan MCK Komunal di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah sehat yang dilakukan melalui sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat, pada tahun 2013 telah dilakukan di 79 desa, dan dilanjutkan sebanyak 63 desa di tahun 2014;
- 5) Semakin mantapnya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran melalui perawatan rutin guna mengoptimalkan fungsinya, dengan penambahan 1 unit mobil pemadam kebakaran di tahun 2014 sehingga total jumlah mobil pemadam kebakaran menjadi 6 unit

5. **Urusan Penataan Ruang**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penataan Ruang adalah 1) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Pemanfaatan Ruang; dan 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Alokasi anggaran Rp.2.892.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.891.442.500,- sisa sebesar Rp.557.500,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Secara bertahap telah dilakukan penataan dan peningkatan infrastruktur Kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang dimana yang menjadi dasar penataan ruang kota Kepanjen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034 yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2014. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan 2 rancangan Peraturan Daerah di Wilayah Kec. Singosari dan Kec. Lawang, dimana saat ini sedang dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur;

- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta termemanfaatkannya ruang-ruang sesuai peruntukannya, pada tahun 2013 dari 447 Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dengan pemohon sebanyak 456, dan di tahun 2014 adalah sebagai berikut : angka pelayanan perizinan pemanfaatan ruang (Rekomendasi IPPT, Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi Tata Ruang) yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah 407 dari 420 pemohon Rekomendasi IPPT (96,90%), 14 dari 19 pemohon Ijin Lokasi (73,68%), 9 dari 21 pemohon Penetapan Lokasi (42,86%), 60 dari 76 pemohon Pengesahan Site Plan (78,95%), serta 45 dari 45 pemohon Informasi Tata Ruang (100,00%);
- 3) Termemanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya, dari 407 Rekomendasi IPPT yang diterbitkan pada tahun 2014 (dengan pemohon sebanyak 420 pemohon); kesesuaian pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut :
- Sesuai dan Ijin Tanpa Syarat sebanyak : 138
Rekomendasi/ 33,91%
 - Bersyarat dan Terbatas sebanyak : 253
Rekomendasi/ 62,16%
 - Wajib Menyesuaikan sebanyak : 16
Rekomendasi/ 3,93%
- 4) Meningkatkan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan, dimana penegakan hukum terhadap 16 permohonan IPPT pada tahun 2014 yang direkomendasikan “Wajib Menyesuaikan” (ditolak) dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab. Malang..

6. **Urusan Perencanaan Pembangunan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program

Pengembangan Data/Informasi; 2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Program Perencanaan Sosial Budaya; 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan 8) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya budaya inovasi, pengelolaan potensi unggulan daerah, serta berkembangnya daya saing di Kabupaten Malang dengan adanya dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah dan pemilihan Kecamatan Poncokusumo sebagai pilot project pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung perwujudan Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya menjadi Kota Agropolitan;
- 2) Terjaringnya topik-topik penelitian melalui satu pintu dan tersosialisasikannya hasil penelitian/kajian kepada instansi dan masyarakat;
- 3) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain sebanyak 4 daerah (Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Maluku Tengah, dan Provinsi Jawa Timur) yang menghasilkan 4 perjanjian kerjasama di tahun 2014;
- 4) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menghasilkan sebanyak 11 Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama/Rencana Kerja Tahunan di tahun 2014;
- 5) Terselenggaranya fasilitas pelaksanaan kerjasama dengan lembaga vertikal meliputi kerjasama dengan Bank Tabungan Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, BPK RI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BPKP Jatim, PT. Bank Jatim

Cabang Malang, BPJS ketenagakerjaan yang menghasilkan sebanyak 31 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama tahun 2014;

- 6) Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- 7) Meningkatnya pemahaman tentang mekanisme kerjasama dengan pihak luar negeri terutama dengan lembaga asing;
- 8) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, yang bersifat inklusif terhadap masyarakat melalui jalur komunikasi guna mengakomodir aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- 9) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan;
- 10) Semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;
- 11) Meningkatnya pengendalian pembangunan wilayah dalam upaya mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan, serta keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
- 12) Meningkatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, guna menunjang perkembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri.

7. Urusan Perhubungan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan adalah 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan 5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Urusan perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.505.024.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.475.370.000,- sisa sebesar Rp.29.654.000,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya juru parkir yang memiliki pemahaman terhadap kebijakan di bidang perhubungan, pada tahun 2013 telah dilakukan pembekalan terhadap 1.000 juru parkir, meningkat sebanyak 1.200 juru parkir di tahun 2014;
- 2) Dipertahankannya kualitas teknis hasil pengujian kendaraan bermotor dengan tersedianya peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas, pada tahun 2013 telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 44.931 kendaraan, meningkat sebanyak 47.502 kendaraan di tahun 2014;
- 3) Bandara Abdulrahcman Saleh terus diupayakan agar dapat secara optimal berfungsi dalam rangka memberikan pelayanan bagi pengguna angkutan pesawat terbang dan maskapai penerbangan, pada tahun 2013 jumlah penumpang udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 526.036 orang untuk kedatangan 265.748 orang dan untuk keberangkatan 260.288 orang, sedangkan untuk cargo seberat 5.536.711 kg, untuk kedatangan seberat 3.208.275 dan untuk keberangkatan 2.328.436 kg, dan di tahun 2014 jumlah penumpang udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 626.638 orang untuk kedatangan 315.040 orang dan untuk keberangkatan 311.598 orang, sedangkan untuk cargo seberat 2.184.441 kg, untuk kedatangan seberat 1.691.679 kg. dan untuk keberangkatan 492.762 kg. Bandara Abdulrachman Saleh memberikan pelayanan pada tahun 2013 sebanyak 4.812 penerbangan, yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.430 penerbangan, Sriwijaya Air 2.110 penerbangan, Batavia Air 60 penerbangan, Wing Air 710 penerbangan, Citilink 470 penerbangan, dan Express Air 32 penerbangan, dan di tahun 2014 pelayanan sebanyak 5.638 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.410 penerbangan, Sriwijaya Air 2.486 penerbangan, Wing Air

688 penerbangan, Citilink 724 penerbangan dan Kalstar 330 penerbangan;

- 4) Meningkatnya disiplin dan ketertiban lalu lintas dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, dan melaksanakan operasi pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna/pemilik angkutan barang dan umum, pada tahun 2013 telah dilaksanakan operasi pengamanan penertiban pengguna/pemilik angkutan barang dan umum sebanyak 40 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.569, dan di tahun 2014 dilaksanakan kegiatan sebanyak 42 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.118 pelanggaran atau terjadi penurunan jumlah pelanggaran sebanyak 28,74%; Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dimana APILL berfungsi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas menjadi tertib, lancar dan aman, pada tahun 2013 jumlah APILL 9 buah, bertambah menjadi 10 buah di tahun 2014, serta terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2013 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sebanyak 7.912 buah, meningkat menjadi 8.069 buah di tahun 2014 yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light, patok pengaman jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), mini RPPJ, paku jalan, rambu portable dan traffic terpasang pada ruas-ruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan tepi jurang yang mempunyai geometrik jalan yang cukup terjal. Tersedianya marka jalan yang berfungsi untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas sehingga meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, pada tahun 2013 marka yang telah terpasang berjumlah 34.026 m², meningkat menjadi 37.576 m² di tahun 2014;
- 5) Terlayannya Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Barang, pada tahun 2014 sebanyak 4.635 dan terlayannya Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Orang sebanyak 1.622.

8. **Urusan Lingkungan Hidup**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup adalah 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan 5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan. Urusan lingkungan hidup dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.126.930.745,- dan terealisasi sebesar Rp.16.954.869.053,- sisa sebesar Rp.172.061.692,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen UKL UPL dan SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan, pada tahun tahun 2013 telah direkomendasi sebanyak 116 dokumen (64 dokumen UKL UPL dan 52 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen lingkungan sampai dengan akhir tahun 2013 bertambah menjadi 637 kegiatan/usaha. Dan di tahun 2014 telah direkomendasi sebanyak 163 dokumen (93 dokumen UKL-UPL dan 70 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sampai dengan tahun 2014 adalah 800 pelaku usaha/kegiatan.
- 2) Kinerja pengawasan terhadap perusahaan yang ditunjukkan dengan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri, pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang memenuhi baku mutu sebanyak 75,86% dari 29 perusahaan yang rutin diawasi selama tahun 2013. Dan pada tahun 2014 dari 30 perusahaan yang rutin diawasi, sejumlah 60% memenuhi baku mutu. Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena : (1). Belum optimalnya pengoperasian Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) pada beberapa perusahaan seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah tidak dapat dilakukan secara maksimal; (2). Tidak dilakukannya perawatan IPAL seperti pembersihan berkala pada saluran penyaringan limbah sehingga sehingga mempengaruhi/

menurunkan kinerja pengolahan limbah pada tahap-tahap berikutnya; dan (3). Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya dengan ketentuan persyaratan pembagian kelas sungai yang lebih ketat terhadap pembuangan air limbah dibanding baku mutu sebelumnya.

- 3) Meningkatnya kinerja pengawasan terhadap perusahaan juga ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, pada tahun 2013 sebanyak 10 perusahaan, menjadi 11 perusahaan di tahun 2014 dengan hasil penilaian 8 perusahaan masuk kategori biru. Sementara hasil pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup pada 50 usaha/kegiatan menunjukkan 38% taat peraturan, 36% kurang taat dan sisanya 26% tidak taat. Kriteria penilaian pentaatan didasarkan pada kepemilikan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL), ada tidaknya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Ijin TPS Limbah B3 serta uji limbah dan udara yang dilakukan.
- 4) Meningkatnya kinerja dalam pemantauan kualitas udara ambient, pada tahun 2013 pemantauan kualitas udara ambient dilakukan pada 15 lokasi di wilayah Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009, terdapat 5 lokasi yang tidak memenuhi baku mutu. Untuk kebisingan sesuai Permenkes Republik Indonesia No.718/Men.Kes/Per/XI/1987 hanya 2 lokasi yang memenuhi baku mutu dan 13 lokasi tidak memenuhi baku mutu sesuai dengan batas kebisingan yang dipersyaratkan pada masing-masing lingkungan, dilanjutkan di tahun 2014 dari 15 lokasi yang dipantau terdapat 10 lokasi yang memenuhi baku mutu, 5 lokasi lainnya tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan ditinjau dari tingkat kebisingannya terdapat 2 lokasi yang memenuhi baku mutu dan 13 lokasi yang tidak memenuhi baku mutu;

- 5) Kinerja pemantauan kualitas air juga dilakukan melalui pemantauan kualitas air badan air, pada tahun 2013 pemantauan kualitas air badan air dilakukan pada 23 lokasi dengan hasil tidak ada yang memenuhi baku mutu, dilanjutkan pemantauan pada 22 lokasi di tahun 2014 dengan juga tidak memenuhi baku mutu;
- 6) Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan, pada tahun 2013 telah dilakukan penghijauan di sekitar 12 sumber air pada lahan seluas sekitar 7,2 ha, dilanjutkan penghijauan di sekitar 33 sumber air pada lahan seluas 24,73 ha di tahun 2014;
- 7) Bertambahnya luas area terbuka hijau yang terpelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota, pada tahun 2013 dilakukan penanaman di kanan kiri jalan di 2 desa/kelurahan seluas 7.000 m², dilanjutkan lagi di 2 desa seluas 5.000 m² di tahun 2014. Bertambahnya luas taman sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada tahun 2013 yang terpelihara seluas 29.767,83 m², meningkat menjadi seluas 38.898 m² di tahun 2014;
- 8) Semakin berkembangnya metode pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat dengan model TPS 3R dan Bank Sampah, pada tahun 2013 telah berkembang 14 lokasi TPS 3R dengan jumlah sampah terkelola sebesar 129,2 m³/hari, berkembang menjadi 23 lokasi TPS 3R dengan jumlah sampah terkelola sebesar 240 m³/hari di tahun 2014. Disamping itu telah terbentuk Bank Sampah yang ada di beberapa cluster di Kota Kepanjen, pada tahun 2013 sejumlah 13 kelompok, menjadi 24 kelompok di tahun 2014.
- 9) Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dengan pemanfaatan energi baru terbarukan dari bahan baku sampah (gas metan), yang juga mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, pada tahun 2013 telah ada 102 SR, meningkat menjadi 195 SR di tahun 2014. Sedangkan di TPA Paras Poncokusumo, pada tahun 2013 dan tahun 2014 terdapat 165 SR. Pemanfaatan gas metan untuk pengembangan ekonomi kreatif antara lain untuk penggunaan usaha kecil skala rumah tangga;

9. **Urusan Pertanahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanahan adalah 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Urusan pertanahan dialokasikan anggaran Rp.25.866.019.950,- dan terealisasi sebesar Rp.12.904.335.425,- sisa sebesar Rp.12.961.684.525,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya penilaian harga tanah pada lokasi rencana pengadaan tanah, pada tahun 2013 di 16 lokasi, dan pada 12 lokasi di tahun 2014;
- 2) Meningkatnya pengelolaan asset tanah Pemerintah Kabupaten Malang melalui pensertipikatan, pada tahun 2013 sebanyak 86 bidang (terbit 44 sertipikat) dan dilanjutkan sebanyak 63 bidang (terbit 4 sertipikat) di tahun 2014;
- 3) Meningkatnya penanganan dan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang, pada tahun 2013 sebanyak 12 penanganan, dan sebanyak 12 penanganan di tahun 2014.

10. **Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan anggaran Rp.3.007.429.500,- dan terealisasi sebesar Rp.2.957.268.600,- sisa sebesar Rp.50.160.900,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Perekaman data biometric Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pada tahun 2013 sebanyak 1.700.817 orang atau 100,41% dari quota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.962.776 orang sudah terekam sejumlah 1.713.817 orang (87,3%) di tahun 2014; Terlaksananya penerbitan akta kelahiran

sebanyak 80.000 lembar, akta perkawinan sebanyak 1.000 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 162.000 lembar dan tahun 2014 penyediaan blangko KK sebanyak 150.000 lembar, akta kelahiran 90.800, akta perkawinan 300 lembar dengan realisasi penerbitan KK sejumlah 902.800, akta kelahiran sejumlah 59.183, akta perkawinan sejumlah 510, akta kematian 52, akta perceraian 91, serta kutipan II sejumlah 549 lembar.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Perempuan adalah 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.101.389.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.098.719.000,- sisa sebesar Rp.2.670.000,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kesetaraan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan kelompok rentan, melalui upaya diseminasi Hukum dan HAM, sosialisai peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan jaringan berbasis perempuan dan Perlindungan anak berupa (1). Peran Lembaga Pendidikan, seperti Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Negeri Malang, PSG UIN Maliki, Pusat Study Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang, Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK) Universitas Brawijaya Malang, Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Wisnuwardana Malang dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (LP3A) UNMUH Malang; (2). Eksistensi Gabungan Organisasi

Wanita (GOW) sebagai *agent of transfer* mengakomodasi peran perempuan lintas lembaga yang terdiri dari 26 organisasi wanita di Kabupaten Malang.

- 3) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui: 1) Berbagai bentuk dan pola pemberdayaan perempuan untuk mendorong pembentukan embrio usaha pada kelompok Perempuan. 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang difasilitasi oleh lintas SKPD terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Perlindungan Kelompok Rentan sebagaimana amanat Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan. 4) Penguatan Pokjatap serta Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui upaya peningkatan layanan pengaduan, advokasi, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan. 5) Pemenuhan hak-hak anak yang meliputi pencatatan kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan khusus dan partisipasi anak.
- 4) Meningkatnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan baik dalam pemerintahan, DPRD maupun di sektor informal.

12. **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah

- 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Alokasi anggaran Rp.743.129.500,- dan terealisasi sebesar Rp.733.220.450,- sisa sebesar Rp.9.909.050,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya partisipasi aktif remaja dalam kegiatan pusat informasi konseling remaja;
- 2) Meningkatnya kegiatan monitoring pelayanan KB medis operasi, serta konseling KB metode kontrasepsi jangka panjang;
- 3) Meningkatnya sarana Alat Permainan Edukatif/APE berupa BKB Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita, pada tahun 2013 sejumlah 825 unit, menjadi 858 unit di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya pembinaan institusi masyarakat perdesaan dalam menggerakkan program KB;
- 5) Meningkatnya keterampilan dan kompetensi kader pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan. Hal ini bisa diukur berdasarkan perkembangan jumlah kelompok Bina Keluarga, pada tahun 2013 jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sejumlah 893 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) sejumlah 151 kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) sejumlah 330 kelompok, meningkat pada tahun 2014 kelompok BKB sejumlah 918 kelompok, BKR sejumlah 158 kelompok, dan BKL sejumlah 331 kelompok. Untuk jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mengalami penurunan, pada tahun 2013 jumlah kelompok UPPKS sejumlah 305 kelompok, menjadi 197 kelompok di tahun 2014, hal ini disebabkan sejumlah 108 kelompok UPPKS telah meningkat statusnya menjadi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berbadan hukum dan Koperasi Wanita (KOPWAN) yang selanjutnya menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang

13. **Urusan Sosial**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosial adalah 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Program Pembinaan Anak Terlantar; 4) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma; 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); dan 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan. Urusan sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.910.374.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.878.738.025,- sisa sebesar Rp.31.636.575,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2013 sebesar 19,99%, meningkat menjadi sebesar 86,30% di tahun 2014, serta meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan PMKS, pada tahun 2013 sebesar 3% dari total PMKS yang ada setiap tahunnya, menjadi sebesar 3,5% di tahun 2014;
- 2) Bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pemberian bantuan berupa hewan ternak, bibit ikan, peralatan bengkel, usaha sektor informal lainnya, dan bantuan bagi fakir miskin, pada tahun 2013 sejumlah 35.906 orang, meningkat menjadi 146.381 orang di tahun 2014;
- 3) Berkurangnya beban bagi korban bencana alam antara lain: erupsi Gunung Kelud, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, melalui pelaksanaan penyaluran bagi korban bencana, pada tahun 2013 sejumlah 1.676 KK, menjadi 45.500 KK di tahun 2014;
- 4) Pemberian motivasi bagi anak terlantar dalam hal bakat dan keterampilan, pada tahun 2013 sejumlah 180 anak, dan dilanjutkan sejumlah 180 anak di tahun 2014;
- 5) Meningkatnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat, sehingga dapat digunakan sebagai bakal untuk meningkatkan taraf hidupnya, pada tahun 2013 sejumlah 30 orang, meningkat menjadi 80 orang di tahun 2014;
- 6) Meningkatnya produktivitas penghuni panti asuhan melalui pemberian bantuan stimulan dan keterampilan, pada tahun 2013 sebanyak 8 panti asuhan/ 80 anak, meningkat menjadi sebanyak 20 panti asuhan/ 100 anak di tahun 2014;
- 7) Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara terus menerus dilakukan melalui peblikasi

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di beberapa tempat strategis dan di sekolahan, pada tahun 2013 sejumlah 28 anak, dilanjutkan sejumlah 25 anak di tahun 2014;

14. Urusan Tenaga Kerja

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan. Urusan ketenagakerjaan dialokasikan anggaran Rp.1.811.359.100,- dan terealisasi sebesar Rp.1.707.383.600,- sisa sebesar Rp.103.975.500,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1). Bertambahnya kualitas angkatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan, pada tahun 2013 sebanyak 26 kegiatan dengan peserta 970 orang, bertambah sebanyak 11 kegiatan dengan peserta 900 orang di tahun 2014, serta menurunnya angka pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan, pada tahun 2013 sebanyak 75 pelanggaran, menurun sebanyak 53 pelanggaran di tahun 2014;
- 2). Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan 5) Program Peningkatan Pelayanan. Alokasi anggaran Rp.1.092.532.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.087.208.400,- sisa sebesar Rp.5.324.100,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya partisipasinya masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan, serta memperluas akses masyarakat terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha, sarana prasarana sosial ekonomi, permodalan dan informasi;
- 2) Meningkatnya jumlah koperasi, pada tahun 2013 dari 1.095 koperasi, menjadi 1.104 koperasi di tahun 2014 yang diikuti dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi sebanyak 273.070 orang dengan asset mencapai Rp1.485.346.075.000,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp1.890.928.632.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp33.263.236.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 4.776 orang, serta meningkatnya jumlah UMKM, pada tahun 2013 sejumlah 406.180 unit, menjadi 414.516 unit di tahun 2014 dengan omzet Rp41.848.153.300.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225.043 orang, dimana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah berupaya memberikan bimbingan/pendampingan dan menyediakan fasilitas permodalan melalui UPTD PPK BLUD Dana Bergulir, Konsultasi Bisnis melalui Klinik KUMKM, serta sarana promosi pemasaran melalui Griya KUMKM;
- 3) Semakin muda pelayanan Klinik KUMKM dimana pada Tahun 2013 telah dilakukan pelayanan pendampingan Advokasi, Pembiayaan, Pemasaran, pelatihan, Konsultasi KUMKM kepada sejumlah 300 UMKM dan di tahun 2014 sebanyak 300 UMKM;
- 4) Bertambahnya keterampilan kewirausahaan bagi KUMKM, pada tahun 2013 telah dilakukan pembinaan kepada 1.000 WUB (Wirausaha Baru), serta 1.050 anggota koperasi dalam pengembangan usaha koperasi, menjadi sebanyak 1.500 (WUB) serta 1.750 anggota koperasi dalam pengembangan usaha koperasi;
- 5) Mendorong dan membangkitkan gairah usaha para usaha mikro, kecil dan koperasi pada umumnya melalui penggalan modal sendiri dari anggota koperasi,

masyarakat maupun perkuatan modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Malang. Perkuatan modal yang telah diberikan kepada Koperasi dan UMKM yang berbentuk modal hibah, kemitraan, modal bergulir sarana dan prasarana usaha, pada akhir tahun 2013 berjumlah Rp132.623.730.000,-, menjadi sebesar sebesar Rp141.713.230.000,- di akhir tahun 2014

16. Urusan Penanaman Modal

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal adalah 1) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Alokasi anggaran Rp.592.399.000,- dan terealisasi sebesar Rp.565.615.000,- sisa Rp.26.784.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya nilai investasi, pada tahun 2013 sebesar Rp.6.326.277.158.745,-, meningkat sebesar Rp.6.346.277.158.745,- di tahun 2014;
- 2) Meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN, pada tahun 2013 terserap sebanyak 24.802 orang, meningkat sebanyak 25.052 orang di tahun 2014.

17. Urusan Kebudayaan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan adalah 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.425.815.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.327.215.000,- sisa sebesar Rp.98.600.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya seni budaya khususnya budaya malangan dengan dilakukannya pelestarian 72 karakter topeng, seni tari dan pentas kesenian.

- 2) Meningkatnya kunjungan wisata yang terdiri dari Wisata Alam, Eko Wisata, Wisata Buatan, Wisata Budaya, Wisata Minat Khusus

18. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; 4) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; dan 5) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Alokasi anggaran Rp.7.002.971.500,- dan terealisasi sebesar Rp.6.893.730.500,- sisa sebesar Rp.109.241.000,- Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jiwa patriotisme, kedisiplinan dan rasa nasionalisme, serta kreatifitas usaha bagi pemuda;
- 2) Semakin meningkatnya jiwa kewirausahaan dan kemandirian hidup pemuda;
- 3) Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap kecintaan olahraga melalui pembinaan dan pemasayarakatan olahraga;
- 4) Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan pembangunan sarana olahraga;
- 5) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga tradisional dalam upaya pelestarian nilai budaya dibidang olahraga.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal; 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama; 4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 6) Program Penanggulangan Bencana; dan 7) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

Alokasi anggaran Rp.5.241.309.750,- dan terealisasi sebesar Rp.4.919.023.500,- sisa sebesar Rp.322.286.250,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya supremasi hukum dalam menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan penertiban dengan rincian: reklame insidentil target penertiban sejumlah 4.800 buah dan telah dilakukan penertiban sejumlah 4.905 buah reklame, reklame terbatas target penertiban sejumlah 59 buah reklame dan telah dilakukan penertiban sejumlah 258 dengan rincian: 85 dibongkar, 121 urus izin dan 52 dalam proses serta dilakukan sidang tipiring dengan target 2 kali sidang (30 kasus), untuk sidang tipiring ini hanya dapat dilakukan 1 kali giat yang ditangani sebanyak 12 kasus;
- 2) Dengan diselenggarakannya sosialisasi tentang keamanan diharapkan ada pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat;
- 3) Meningkatnya fasilitasi yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus berlatar belakang masalah agama;
- 4) Semakin terkendalinya pengamanan kerja pimpinan, serta tertibnya aksi unjuk rasa;
- 5) Mantapnya kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalin hubungan/koordinasi dengan TNI/POLRI dalam menciptakan kondisi Kabupaten Malang yang tertib, aman dan nyaman;
- 6) Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana, serta ketrampilan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 7) Meningkatnya koordinasi dan monitoring kesiapsiagaan di daerah bencana.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah 1) Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH; 3) Program Pendidikan Kedinasan; 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 5) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 11) Program Peningkatan Pelayanan Publik; 12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 14) Program Penelitian dan Pengembangan; dan 15) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan. Alokasi anggaran Rp.88.713.796.884,- dan terealisasi sebesar Rp.76.025.389.943,- sisa sebesar Rp.12.688.406.941,- Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya fasilitasi dan dukungan teknis/administrasi kegiatan Badan Pengawas/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk pengawasan dan pembinaan pengelolaan BUMD, serta meningkatnya monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja BUMD secara periodik, dan menyiapkan administrasi materi arahan/penekanan tugas kepada Direksi BUMD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- 2) Tertanganinya 165 kasus dalam pemeriksaan reguler dan pemeriksaan non reguler dengan rincian sebagai berikut:
 - (1). indisipliner sebanyak 47 kasus; (2). pengaduan masyarakat sebanyak 27 kasus; (3). kehilangan aset sebanyak 5 kasus; (4). perceraian sebanyak 20 kasus; (5). pemeriksaan khusus sebanyak 6 kasus; dan (6). pemeriksaan lanjutan dan monitoring penyelesaian kasus sebanyak 60 kasus; dan terlaksananya kepastian hukum dalam peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia;

- 3) Meningkatnya jumlah PNS Kabupaten Malang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2013 sebanyak 16.089 orang, menjadi 16.378 orang di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan jabatan fungsional terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti: tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan jabatan fungsional tertentu, sebagai upaya memantapkan kinerja organisasi untuk mendukung terhadap kinerja pemerintahan;
- 5) Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. Malang, sebanyak 14 Bagian Setda di tahun 2014;
- 6) Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi terhadap Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa, dengan hasil yang diharapkan adalah: (1). Dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing; (2). Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan (3). Meningkatkan pemahaman Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa terhadap Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mewujudkan pejabat pengadaan yang handal dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup SKPD, melalui Ujian Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional;
- 7) Meningkatnya kualitas naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang aktual, faktual dan akurat;
- 8) Tersedianya informasi tentang potensi dan karakteristik tanaman padi serta produksi beras; informasi kondisi aktual sistem rantai pasok beras; konsep dan strategi manajemen rantai pasok beras yang efektif dan efisien dan rumusan langkah untuk meningkatkan jaringan Rantai Pasokan Beras di Kab. Malang;
- 9) Adanya rekomendasi bagi Pemerintah Kab. Malang untuk melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan kapasitas pemerintah desa menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seta

dapat mengembangkan pengetahuan yang berkaitan tentang pengembangan kapasitas dan kinerja tata kelola pemerintahan desa melalui dimensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dimensi organisasi dan dimensi sistem;

- 10) Tersedianya data tentang kondisi existing sumber daya aparatur, berikut peta potensi dan permasalahannya sehingga menjadi acuan dalam mengkonsepsi kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global di Kab. Malang, tersedianya informasi tentang kebutuhan Aparatur di Kab. Malang, sehingga dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan adaptasi serta pengurangan dampak pemanasan global dan diperoleh rumusan strategi penguatan sumber daya aparatur yang nantinya dapat menjadi acuan bagi SKPD yang berkompeten dalam melakukan kegiatan pengurangan dampak pemanasan global;
- 11) Adanya bahan acuan, pedoman dalam penyusunan dokumen Kawasan Industri yang pada akhirnya akan memudahkan para pelaku usaha untuk menanamkan investasinya di Kab. Malang;
- 12) Teridentifikasinya Potensi Bio-gas dan Bio-elektrik yang dapat digunakan sebagai bahan acuan, pedoman dalam penyusunan dokumen pengembangan energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan untuk dapat dikembangkan di SWP lainnya di Kabupaten Malang, dan siap untuk dijadikan dasar pengembangan dan implementasi teknologi tepat guna bio-gas dan bio-elektrik sebagai energi alternatif terbarukan yang berkelanjutan;
- 13) Diperoleh gambaran dan persepsi publik tentang capaian pembangunan di Kab. Malang, serta aspirasi publik tentang pembangunan infrastruktur di Kab. Malang;
- 14) Tersusunnya dokumen data dan profil potensi sumber daya alam Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, serta konsep dan strategi pola optimalisasi potensi ekonomi kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan pemerintah Kab. Malang dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo;

- 15) Tersedianya data tentang kondisi objektif organisasi kecamatan di Kab. Malang, berikut peta potensi dan permasalahannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan optimalisasi pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan PATEN, tersedianya informasi tentang berbagai kebutuhan institusi kecamatan dan SKPD terkait di Kab. Malang sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan PATEN di kabupaten Malang, dan terumuskannya konsepsi dan strategi implementasi PATEN bagi organisasi pemerintahan kecamatan di Kab. Malang;
- 16) Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kab. Malang dalam menyusun kebijaksanaan yang berkaitan dengan model/pola komunikasi politik anggota DPRD terhadap konstituen di masing-masing Dapil di wilayah Kabupaten Malang, sebagai bahan masukan bagi lembaga DPRD, partai politik/fraksi, anggota, dalam melakukan komunikasi politik secara baik terhadap konstituen. Sebagai bahan masukan bagi masing-masing Dapil di Kabupaten Malang dalam menyusun rencana dan sekaligus implementasi serta kontrol pembangunan dengan mendorong adanya peningkatan partisipasi masyarakat, bagi masyarakat; mengetahui tingkat partisipasi dan efektifitas aspirasi yang disampaikan kepada masing-masing anggota DPRD.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Alokasi anggaran Rp.3.300.962.440,- dan terealisasi sebesar Rp.3.232.985.600,- sisa sebesar Rp.67.976.840,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus diantaranya: hasil produksi padi sebesar 461.306 ton, tingkat ketersediaan beras lokal 299.849 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 228.440 ton dengan demikian terdapat surplus beras sebesar 71.409 ton. Jagung hasil produksi dan ketersediaan sebesar

248.879 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 23.080 ton sehingga terdapat surplus jagung sebesar 225.799 ton. Ubi kayu hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 306.559 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 67.986 ton sehingga surplus ubi kayu sebesar 238.573 ton. Gula hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 2.323.425 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 22.327 ton sehingga terdapat surplus gula sebesar 2.301.098 ton. Daging hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 22.620 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 6.272 ton sehingga terdapat surplus daging sebesar 16.348 ton. Susu hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 118.971 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 17.059 ton sehingga terdapat surplus susu sebesar 101.912 ton.

- 2) Aspek keragaman pangan masyarakat yang skalanya dinyatakan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat yaitu dari skor PPH, pada tahun 2013 sebesar 87, menjadi 87,3 di tahun 2014.
- 3) Angka Kecukupan Protein (AKP) kondisinya masih sedikit dibawah standar nasional sebesar 52 gram/kapita/hari, sebesar 51,90 gram/kapita/hari. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE), pada tahun 2013 sebesar 1.853 kilokalori/kapita/hari, menjadi 1.912,4 kilokalori/kapita/hari di tahun 2014.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan 5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. Alokasi anggaran Rp.3.053.303.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.022.716.000,- sisa sebesar Rp.30.586.000,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pelayanan perangkat kecamatan, desa dan kelurahan, melalui pelatihan dan fasilitasi kemampuan kinerja, pada tahun 2014 untuk penguatan pemerintahan desa telah dialokasikan anggaran Rp100.836.848.000,-;
- 2) Tersedianya data base profil desa dalam mendukung proses perencanaan dan kebijakan pembangunan desa melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- 3) Meningkatnya pemasaran produk kelompok masyarakat melalui fasilitasi pemasaran dan promosi di tingkat nasional;
- 4) Meningkatnya kepedulian masyarakat desa dalam meningkatkan fungsi sumber mata air desa, serta terjaganya kelestarian sumber mata air desa;
- 5) Meningkatnya keterampilan kelompok perempuan perdesaan dalam upaya meningkatkan pendapatannya

23. Urusan Statistik

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah: Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Alokasi anggaran Rp.527.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.513.834.000,- sisa Rp.13.166.000,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA);
- 2) Tersajinya data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita;
- 3) Tersedianya data statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat

24. Urusan Kearsipan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kearsipan adalah 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan 4) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Alokasikan anggaran sebesar Rp1.565.122.400,- dan terealisasi sebesar Rp1.519.870.850,- sisa sebesar Rp 45.251.550,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya sistem administrasi kearsipan dengan meningkatnya sumber daya manusia, pada tahun 2013 sejumlah 82 orang dan sejumlah 76 orang sumber daya manusia kearsipan di tahun 2014. Jumlah aparatur pemerintah desa/kelurahan yang telah dibimtek kearsipan sebanyak 421 orang di tahun 2014;
- 2) Tercapainya pengumpulan data tentang Kab. Malang dari media cetak dalam bentuk kliping, pada tahun 2013 diperoleh 30 kliping dan diperoleh 22 kliping di tahun 2014;
- 3) Meningkatnya upaya-upaya penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip, pada tahun 2013 sebanyak 500 berkas arsip telah tertata di depo arsip Kab. Malang, meningkat sebanyak 6.368 berkas arsip dengan kondisi siap layanan;
- 4) Meningkatnya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika adalah 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media; dan 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Alokasi anggaran Rp.7.851.182.400,- dan terealisasi sebesar Rp.7.617.844.010,- sisa sebesar Rp.233.338.390,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Tersebar nya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Siaran Radio Kanjuruhan FM, pada tahun 2013 sebanyak 192 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam, dan sebanyak 302 kali diaolg interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam di tahun 2014;
- 2) Meningkatnya layanan pada warga. Melalui respon yang cepat terhadap surat warga yang ditujukan kepada Kepala Daerah maupun kepala SKPD melalui menu yang ada dalam website malangkab.go.id., kunjungan ke website malangkab.go.id, pada tahun 2013 sebanyak 1.680.339 pengunjung, meningkat sebanyak 2.503.888 pengunjung di tahun 2014;
- 3) Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari tentang komunikasi dan informatika, melalui sarana Telecentre yang terdapat di Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Poncokusumo, dan Kecamatan Wajak, serta program internet gratis melalui sarana M-CAP

26. Urusan Perpustakaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan perpustakaan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Alokasi anggaran sebesar Rp.203.234.200,- dan terealisasi sebesar Rp.202.216.800,- sisa sebesar Rp.1.017.400,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum, pada tahun 2013 sebanyak 3.882 KTA, menjadi sebanyak 4.002 KTA di tahun 2014 dan bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan umum, pada tahun 2013 sebanyak 2.290 orang, menjadi sebanyak 22.200 orang di tahun 2014.
- 2) Meningkatnya budaya baca dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling (Mobil Perpustakaan Keliling/MPK), pada tahun 2013 jumlah pengunjung MPK sebanyak 8.295 orang, meningkat menjadi 8.596 orang di tahun 2014.
- 3) Meningkatnya perpustakaan desa/kelurahan pada tahun 2013 jumlah perpustakaan desa/kelurahan sebanyak 30 lembaga, meningkat menjadi sebanyak 32 lembaga di tahun 2014;

2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan; 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; dan 9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. Alokasi anggaran Rp.37.521.579.931,- dan terealisasi sebesar Rp.36.914.709.850,- dengan sisa sebesar Rp.606.870.081,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi padi, pada tahun 2013 sebesar 461.291 ton, menjadi 461.306 ton di tahun 2014;
- 2) Meningkatnya produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan panili, pada tahun 2013 total produksi sebesar 441.601 ton, meningkat menjadi 442.175 ton di tahun 2014. Pada produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir, pada tahun 2013 sebesar 327.771 ton, meningkat menjadi sebesar 328.197 ton di tahun 2014.
- 3) Meningkatnya pendapatan perkapita petani bidang pertanian pangan, pada tahun 2013 sebesar Rp11.915.691,-, menjadi Rp11.917.181 atau naik 0,013% di tahun 2014, sedangkan pendapatan petani bidang perkebunan, pada tahun 2013 sebesar Rp13.883.469,- meningkat sebesar Rp13.901.517,- atau naik 0,16% di tahun 2014;
- 4) Capaian target populasi sapi potong tahun 2014 adalah 99,11% atau sebesar 199.453 ekor. Hal tersebut karena pada tahun 2013 terjadi sebuah fenomena penurunan populasi sapi secara nasional akibat kebijakan pengurangan impor sapi, dimana para peternak banyak

menjual sapi karena harganya mahal. Di Kabupaten Malang penurunan populasi sapi potong saat itu mencapai 16,3% atau sebesar 189.145 ekor bila dibanding tahun 2011 sebesar 225.895 ekor, namun demikian secara kuantitas jumlah populasi sapi potong tahun 2014 mengalami kenaikan 5,45% yaitu sebesar 199.453 ekor, bila dibanding dengan populasi tahun 2013 sebesar 189.145 ekor. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah kelahiran hasil IB sebesar 58.831 ekor (2,53%) bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 57.382 ekor. Demikian pula capaian target populasi sapi perah tahun 2014 adalah 96,72% atau sebesar 73.339 ekor. Dengan alasan yang sama sebagaimana kondisi sapi potong, populasi sapi perah pada tahun 2011 adalah 89.143 ekor, turun pada tahun 2013 menjadi 72.217 ekor. Secara kuantitas, populasi sapi perah pada tahun 2014 mengalami kenaikan 4,80% atau sebesar 75.683 ekor;

- 5) Seiring dengan meningkatnya semangat usaha budidaya ternak kambing pada wilayah-wilayah sentra populasi dan implementasi teknologi tepat guna (IB), pada tahun 2013 sebesar 225.374 ekor, mengalami kenaikan 2,01% atau sebesar 229.897 ekor di tahun 2014;
- 6) Kondisi pengembangan usaha ternak unggas terdapat kemajuan yang signifikan. Hal tersebut karena kondisi peternak unggas sudah pada fase kemandirian usahanya. Pemerintah hanya memberikan stimulan dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit berupa pemberian desinfektan dan vaksin, pada tahun 2013 populasi ayam petelur sebesar 2.920.857 ekor, mengalami kenaikan 72,31% atau sebesar 5.033.010 ekor di tahun 2014. Sedangkan ayam pedaging, pada tahun 2013 sebesar 16.044.990 ekor, mengalami kenaikan 38,61% atau sebesar 22.240.160 ekor di tahun 2014;
- 7) Produksi daging juga mengalami peningkatan 2,10% atau sebesar 22.325,74 ton pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan produksi daging tahun 2013 sebesar 21.866,55 ton. Hal tersebut utamanya ditunjang oleh adanya kenaikan populasi ayam pedaging;

- 8) Pencapaian target produksi susu, pada tahun 2013 sebesar 116.033,57 ton, mengalami kenaikan 1,04% atau sebesar 117.235,67 ton di tahun 2014;
- 9) Seiring dengan peningkatan populasi ayam petelur, pada tahun 2013 sebesar 25.080,21 ton, mengalami kenaikan 9,69% atau sebesar 27.510,13 ton di tahun 2014;
- 10) Perkembangan gairah usaha sub sektor peternakan dalam kurun waktu empat tahun berdampak pada hal-hal berikut:
 - a. Pendapatan peternak sapi potong naik 4,84% atau sebesar Rp14.028.642,- bila dibanding tahun 2013 sebesar Rp13.380.660,-;
 - b. Pendapatan peternak sapi perah naik 2,49% atau sebesar Rp14.938.382,- bila dibanding tahun 2013 sebesar Rp14.575.600,-;
 - c. Pendapatan peternak unggas naik 5,88% atau sebesar Rp14.938.382,- dibanding tahun 2013 sebesar Rp14.108.400,-; dan
- 11) Penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak naik 7,14% atau sebesar 244.868 orang bila dibanding tahun 2013 sebesar 228.541 orang

2. Urusan Kehutanan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat. Alokasi anggaran Rp.1.233.796.272,- dan terealisasi sebesar Rp.1.225.661.000,- sisa sebesar Rp.8.135.272,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Dipertahankannya proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pada tahun 2013 seluas 3.942,34 ha dan dilanjutkan seluas 3.296,125 ha di tahun 2014. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/outcome yakni menggunakan indikator rasio rehabilitasi hutan dan

- lahan, maka rasio rehabilitasi hutan dan lahan yang tercapai, pada tahun 2013 mencapai angka 0,0340 atau terlampaui 0,0105 (44%) dari target 0,0235 dan rasio rehabilitasi hutan dan lahan tercapai 0,0284 atau terlampaui 0,0077 (37%) dari target 0,0207 di tahun 2014; Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan berupa kegiatan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi), patroli kawasan hutan, pembuatan persemaian permanen, pemeliharaan tanaman arboretum, sekolah konservasi dan penanaman sekitar sumber air, pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi) seluas 1.082,8 ha, kegiatan pelestarian sumber mata air sebanyak 1.200 batang pada luasan 3 ha (1 sumber air), sekolah konservasi 7 unit, pemeliharaan tanaman arboretum 1.500 batang, pembuatan persemaian permanen sebanyak 5.000 batang serta pemberian bibit kompensasi pembangunan JLS sebanyak 10.350 batang. Pada tahun 2014 telah dilakukan pencegahan kebakaran hutan dalam bentuk patroli kawasan hutan sebanyak 3 kali dan inventarisasi data dalam kawasan, pembuatan persemaian dan pemeliharaan arboretum sebanyak 2.500 batang, kegiatan pelestarian sumber mata air seluas 25 ha, dan sekolah konservasi 4 unit. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/outcome yakni menggunakan indikator rasio penanganan pada kawasan lindung, maka rasio penanganan pada kawasan lindung yang tercapai pada tahun 2013 mencapai angka 0,0064 atau terlampaui 0,0012 (23 %) dari target 0,0052. Sedang pada tahun 2014 rasio penanganan pada kawasan lindung mencapai angka 0,0361 atau terlampaui 0,0213 (144,6 %) dari target 0,0148;
- 2) Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan, hasil hutan non kayu dan even gerakan penanaman, pada tahun 2013 telah terlaksana pembinaan kelembagaan kelompok sebanyak 4 kelompok untuk mendukung PENAS XIV di Kab. Malang, pembinaan aneka usaha kehutanan sebanyak 1 kelompok, dan 1 even puncak aksi penanaman 1 milyar.

Untuk tahun 2014 telah dilaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok sebanyak 2 kelompok, pembinaan aneka usaha kehutanan sebanyak 4 kelompok, dan 4 event kampanye/sosialisasi pembangunan kehutanan. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/outcome yakni menggunakan indikator rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan, maka rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan yang tercapai pada tahun 2013 mencapai angka 0,0255 atau terlampaui 0,0073 (40 %) dari target 0,0182. Pada tahun 2014 rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan yang tercapai mencapai angka 0,0218 atau terlampaui 0,0073 (50 %) dari target 0,0145; Mempertahankan kontribusi hasil hutan terhadap PDRB dengan melakukan kegiatan optimalisasi PNBK, Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil hutan serta Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil hutan dan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat, pada tahun 2013 telah dipenuhi kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp1.380.239.188,-, dengan perolehan dana bagi hasil PSDH untuk Kabupaten Malang sebesar Rp799.406.419,00 (dari target Rp586.417.017), pembinaan kepada industri primer dengan bertambahnya jumlah industri primer yang berizin sebanyak 15 industri, melakukan sosialisasi kepada pejabat penerbit kepala desa sebanyak 25 orang dan jumlah dokumen peredaran hasil hutan sebanyak 1.730 dokumen SKAU yang diterbitkan kepala desa dan 6.329 dokumen yang diterbitkan dinas (volume kayu rakyat yang dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan sebanyak 135.979,84 m³) serta pembinaan kepada 1 industri yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Pada tahun 2014 telah dipenuhi kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp430.420.912,- (dari target Rp1.858.329.156,-) dengan perolehan dana bagi hasil PSDH untuk Kabupaten Malang sebesar Rp699.065.083,- (dari target Rp989.783.903,-) pembinaan kepada industri primer dengan bertambahnya jumlah industri primer yang berizin sebanyak 12 industri, dan jumlah dokumen

peredaran hasil hutan sebanyak 5.969 dokumen SKAU yang diterbitkan kepala desa, 2.005 dokumen yang diterbitkan dinas dan 8.899 dokumen nota angkutan yang diterbitkan oleh perusahaan dan masyarakat (volume kayu rakyat yang dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan sebanyak 302.585,96 m³). Pembinaan kepada industri primer hasil hutan dan kelompok tani hutan rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) diperoleh hasil 5 industri primer telah mendapatkan sertifikat SVLK dan 1 kelompok tani hutan rakyat yang siap mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/outcome yang telah direvisi yakni menggunakan indikator tren nilai Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), maka rasio tren nilai PSDH yang tercapai pada tahun 2014 mencapai angka 0,33 (dari target 1,29);

- 3) Dalam rangka mempertahankan proposal luasan penutupan lahan berhutan dengan langkah menurunkan luas lahan kritis/kurang produktif/terbuka melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman dalam kawasan (hutan negara) seluas 1.082,8 ha dan luar kawasan seluas 2.859,54 ha. Upaya lain untuk pemulihan kualitas lingkungan dilakukan pula melalui konservasi pada lahan kritis di daerah sekitar sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada tahun 2013 dilakukan penanaman disekitar sumber air sebanyak 1.200 batang pada luasan 3 ha (1 sumber air). Selain itu peran serta swasta dalam rangka penanganan lahan kritis dilaksanakan melalui program *Coorporate Social Responsibility* (CSR), dimana pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman sebanyak 5.789 pohon yang ditanam di lahan seluas kurang lebih 14,5 ha. Program CSR ini merupakan salah satu bentuk kepedulian berbagai pihak dalam mendukung upaya perbaikan lingkungan dan mempercepat penanganan lahan kritis. Program CSR sangat bermanfaat dalam mendukung program pemerintah, khususnya kegiatan penghijauan. Pada tahun 2013 program CSR dilakukan PT. Pertamina

BBM Malang, PT. Chiel Jedang Indonesia (CJI) dan Bank Jatim Malang, dengan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain penanaman aneka ragam hayati di sekolah sebanyak 625 batang, pelestarian sumber air 1.164 batang, penghijauan lingkungan 3.000 batang dan penanaman untuk pengendalian jurang 1.000 batang. Pada tahun 2014 telah dilakukan penanaman dalam kawasan (hutan negara) seluas 1.330 ha dan luar kawasan seluas 1.966,125 ha. Upaya lain untuk pemulihan kualitas lingkungan dilakukan pula melalui konservasi pada lahan kritis di daerah sekitar sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada tahun 2014 dilakukan penanaman disekitar sumber air pada luasan 25 ha. Selain itu peran serta swasta dalam rangka penanganan lahan kritis dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dimana pada tahun 2014 telah dilakukan penanaman sebanyak 67.200 batang yang ditanam di lahan seluas kurang lebih 168 ha. Pada tahun 2014 program CSR dilakukan PT Pertamina BBM Malang, PT. Sumber Abadi Bersama (SAB) dan PT. Chiel Jedang Indonesia (CJI), dengan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain pelestarian sumber air 5.700 batang dan penghijauan lingkungan sebanyak 61.500 batang;

- 4) Produksi hasil hutan rakyat berdasarkan dokumen angkutan kayu pada tahun 2013 berupa kayu sebanyak 135.980 m³ dan pada tahun 2014 sebanyak 302.586 m³. Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara pada tahun 2013 berupa kayu sebanyak 37.718 m³ dan getah sebanyak 801,17 ton. Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara pada tahun 2014 berupa kayu sebanyak 23.279,46 m³; getah sebanyak 929,206 ton; kopal 3,146 ton; bambu 6.178 batang dan kayu bakar 10 sm

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi Merusak Lingkungan; 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; dan 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Alokasi anggaran Rp.3.309.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.289.650.000,- sisa sebesar Rp.20.330.000,.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan, serta monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C;
- 2) Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik, yang ditandai dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, pada tahun 2013 sebesar 85,4 % atau 2,51%, meningkat sebesar 2,05% yaitu 87,45% di tahun 2014;
- 3) Meningkatnya pengguna digester biogas, pada tahun 2013 sebanyak 5.393 unit, meningkat sebanyak 5.692 unit di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya luas lahan bekas tambang yang direklamasi, tahun 2013 seluas 3,2 ha (disesuaikan dengan batas akhir berlakunya izin), kewajiban untuk mereklamasi lahan pertambangan sampai masa berlakunya izin, dan seluas 0,5 ha di tahun 2014;
- 5) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan secara intensif, baik untuk penambang yang sudah memiliki izin agar tertib administrasi maupun penambang yang belum berizin agar segera mengurus ijin tambang, pada tahun 2013 sebanyak 50 penambang yang ditertibkan, dan terdapat izin baru sebesar 8 IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan 2 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di tahun 2014

4. Urusan Pariwisata

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pariwisata adalah 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Program Pengembangan Kemitraan; 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan 4) Program Peningkatan Pelayanan. Alokasi anggaran Rp.11.004.643.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.112.542.400,- sisa sebesar Rp.892.100.600,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata budaya dan wisata buatan, untuk mendukung hal tersebut antara lain telah dilaksanakan: perbaikan infrastuktur jalan menuju obyek wisata, pengembangan even wisata seperti : Kirab Budaya Agung, Wisata Rafting, Pemilihan Duta wisata Kab. Malang Joko Roro;
- 2) Meningkatnya promosi pariwisata Kab. Malang, melalui keikutsertaan dalam pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional guna memperkenalkan potensi kepariwisataan Kab. Malang antara lain: Pameran Internationale Tourismus Bosse (ITB) Berlin – Jerman; Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara di Jakarta; dan Pameran Majapahit Travel fair di Surabaya;
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan pariwisata selain melalui program-program, dilakukan pula dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang didukung oleh promosi pariwisata dan budaya, seperti promosi Travel Exchange and Meeting, Incentive Convention and Exhibition (MICE). Selain itu memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta mengoptimalkan *Tourism Information Center* yang ada sejumlah 4 unit;
- 4) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2013 sebanyak 2.384.478 orang dengan rincian 2.362.584 orang wisatawan nusantara dan 21.895 orang wisatawan mancanegara, meningkat sebanyak 2.905.536 orang di tahun 2014 dengan rincian 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang wisatawan mancanegara

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan adalah 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 4) Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran Rp.5.736.069.764,- terealisasi sebesar Rp.5.422.936.904,- sisa sebesar Rp.313.132.860,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi perikanan tangkap, pada tahun 2013 sebesar 10.949,29 ton, meningkat sebesar 11.077,66 ton di tahun 2014;
- 2) Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, pada tahun 2013 sebesar 17.070,16 ton, meningkat sebesar 19.555,84 ton di tahun 2014;
- 3) Meningkatnya konsumsi ikan, pada tahun 2013 sebesar 21,47 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 22,85 kg/kapita/tahun di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya produksi olahan ikan, pada tahun 2013 sebesar 5.856,22 ton, meningkat sebesar 6.355,75 ton di tahun 2014;
- 5) Meningkatnya pendapatan perkapita pembudidaya perikanan, pada tahun 2013 sebesar Rp14.717.700,-, meningkat sebesar Rp16.687.155,- atau meningkat sebesar 13,38 % di tahun 2014;
- 6) Meningkatnya pendapatan perkapita pengolah ikan, pada tahun 2013 sebesar Rp18.144.532,-, meningkat sebesar Rp19.143.000,- atau meningkat sebesar 5,5 % di tahun 2014.

6. Urusan Perdagangan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perdagangan adalah 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang; 4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan 6) Program Resi Gudang. Alokasi anggaran Rp.23.997.250.613,- terealisasi sebesar Rp.19.561.214.212,- sisa sebesar Rp.4.436.036.401,

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pada tahun 2013 sebesar 19.495 perusahaan, menjadi sebesar 20.598 perusahaan di tahun 2014;
- 2) Meningkatnya kinerja ekspor dimana realisasi ekspor, pada tahun 2013 sebesar US\$338.273.135,89, menjadi sebesar US\$345.541.449,41 di tahun 2014;
- 3) Meningkatnya realisasi impor, pada tahun 2013 sebesar US\$71.671.674,94, menjadi sebesar US\$76.000.142,48 di tahun 2014;
- 4) Meningkatnya kinerja pencapaian target retribusi pelayanan pasar, pada tahun 2013 dari target Rp5.015.000.000,- terealisasi Rp.5.123.491.650,- atau 102,34% dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014 dari target Rp.5.115.000.000,- terealisasi Rp.5.298.371.434,- atau 103,58% dari target yang ditetapkan;
- 5) Terkendalinya dan terawasinya makanan impor 140 perusahaan ekspor/impor, pada tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kab. Malang bersama Dinas Kesehatan Kab. Malang mengadakan pengawasan OMKA (Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Alat Kesehatan), dari pengawasan 41 toko/sarana diperoleh hasil: Tidak ada temuan 18 Toko/Sarana (36,6%) dan ada temuan 26 Toko/Sarana (63,4%)
- 6) Terealisasinya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya yang tersebar di wilayah Kab. Malang di 33 pasar

7. Urusan Perindustrian

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau. Alokasi anggaran Rp.52.071.556.638,- terealisasi sebesar Rp.50.519.552.100,- sisa sebesar Rp.1.552.004.538,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya perkembangan industri formal, pada tahun 2013 sebanyak 1.767 unit, meningkat menjadi sebanyak

1.804 unit di tahun 2014. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri formal, pada tahun 2013 sebanyak 105.651 orang, menjadi sebanyak 107.121 orang di tahun 2014. Nilai investasi di sektor industri formal juga mengalami perkembangan, pada tahun 2013 sebesar Rp.2.684.923.643.000,-, sebesar Rp.2.729.225.460.000,- di tahun 2014.

- 2) Jumlah industri informal/rumah tangga juga mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebanyak 20.128 unit usaha, meningkat sebanyak 20.430 unit usaha di tahun 2014. Untuk penyerapan tenaga kerja sektor industri informal/rumah tangga meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 54.571 orang, menjadi 55.116 orang di tahun 2014. Dan nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga, pada tahun 2013 sebesar Rp16.753.767.000, menjadi sebesar Rp16.926.300.000 di tahun 2014.

8. Urusan Transmigrasi

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Alokasi anggaran Rp.384.465.500,- terealisasi sebesar Rp.359.240.300,- sisa sebesar Rp.25.225.200,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai, pada tahun 2013 telah ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 23 KK, dilanjutkan sebanyak 5 KK di tahun 2014. Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal dimana pada tahun 2014 ditujukan untuk 60 orang

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan

dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. adalah sebagai berikut;

1. Urusan Pendidikan:

- a. Masih belum meratanya distribusi guru di wilayah Kabupaten Malang, sehingga upaya pemerataan guru dengan dilakukannya pendataan dengan sistem online melalui aplikasi Dapodik;
- b. APK tingkat SMA/SMK/MA yang relatif masih rendah sebesar 59,30% di tahun 2014 dari target 63,85 di tahun 2014 dan 70% di tahun 2015, sehingga perlu dilakukannya pengadaan USB SMKN di daerah-daerah perbatasan untuk mengantisipasi eksodus siswa ke kota; meningkatkan mutu pembelajaran SMK sehingga mutu SMK di Kabupaten Malang bisa bersaing dengan SMK di kota; dan mendorong tumbuhnya SMK swasta baru yang bermutu untuk menampung siswa lulusan SMP; dan
- c. Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luas biasa, sehingga perlu melakukan pendataan siswa penyandang disabilitas untuk mengetahui jumlah siswa penyandang disabilitas; memaksimalkan sekolah luar biasa yang ada; dan memperbanyak sekolah inklusi di tingkat kecamatan.

2. Urusan Kesehatan

- a. Meningkatnya angka kematian bayi pada tahun 2014 sebesar 6,44 per seribu kelahiran hidup dibanding dengan tahun 2013 sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup, walaupun angka ini masih dibawah target nasional sebesar 24 per seribu kelahiran hidup, penyebabnya karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas,

sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

3. Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum RI masih mensyaratkan perencanaan Dana Alokasi Khusus harus dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan, sehingga langkah yang dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut dengan mengalokasikan anggaran perencanaan untuk pelaksanaan DAK pada tahun berikutnya (n+1);
- b. Belum adanya Peta Skema Konstruksi (PSK) dan Peta Skema Operasi (PSO) di wilayah kerja HIPPA sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri RI Nomor: 293/KPTS/M/2014 tentang Daerah Irigasi, upaya yang perlu dilakukan yaitu segera dibentuknya PSK dan PSO, serta memperkuat kapasitas pemberdayaan petani dalam upaya melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi secara mandiri; dan
- c. Terbatasnya tenaga lapangan untuk melakukan penelusuran jaringan irigasi, sehingga perlu mengoptimalkan tenaga di UPTD serta melakukan penambahan tenaga lapangan.

4. Urusan Perumahan

- a. Dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat permasalahan yang terjadi antara lain: pengembang harus memenuhi kriteria lokasi dan kriteria teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2014 Nomor 1 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu adanya target unit yang harus dibangun pengembang dan dapat memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pembangunan Perumahan

(FLPP); belum adanya lokasi pengembangan baru; dan harga jual rumah sederhana di wilayah Kabupaten Malang melebihi harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp115.000.000,- sehingga DAK tidak dapat diberikan bagi perumahan tersebut. Tingginya harga jual rumah sejahtera tapak (RST) disebabkan karena faktor tingginya harga tanah dan harga bangunan, serta keinginan konsumen rumah yang menginginkan peningkatan mutu untuk rumah RST yang dibeli dari pengembang. Solusi yang dilakukan: SiLPA DAK pada tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015 dengan menunggu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2015 Bidang Perumahan;

- b. Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah layak huni, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum bisa digunakan secara optimal untuk menuntaskan rumah tidak layak huni baik di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga perlu upaya pendataan yang lebih intensif guna memperoleh data yang akurat antara lain melalui pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat, dan pendataan dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat; dan
- c. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas tidak sebanding dengan jumlah prasarana dan sarana pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran sehingga tingkat pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran menjadi belum optimal, maka perlu upaya untuk penambahan pos-pos pantau pencegahan bahaya kebakaran, penambahan armada pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam kebakaran.

5. Urusan Penataan Ruang:

- a. Belum selesainya proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sosio Kultural Kecamatan Singosari-Lawang disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukannya koordinasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal percepatan penetapan peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang menggunakan perda RTRW Kabupaten Malang dan diikuti analisis kesesuaian tata ruang; dan
- b. Kurangnya tenaga staf teknis menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perizinan terkait, sehingga perlu upaya menertibkan dan memberdayakan sumber daya manusia personil teknis dan mengoptimalkan waktu proses dalam penanganan permohonan Rekomendasi IPPT.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan:

- a. Adanya amanat UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa tujuan secara keseluruhan Sisnas P3 Iptek adalah: memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peranan penting dalam pengembangan sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dan tugas Pemerintah Daerah adalah untuk menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang serta perlunya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;

- b. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, masyarakat berkeinginan semua usulan yang diajukan dapat terakomodir secara keseluruhan, sehingga masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah; dan
- c. Kualitas naskah perjanjian kerjasama masih banyak yang belum mengacu pada standar dalam peraturan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penyertaan dalam seminar-seminar yang berkaitan dengan kerjasama.

7. Urusan Perhubungan sebagai berikut:

- a. Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100% pada alat uji rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup) dan alat uji emisi, sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan pada peralatan uji dimaksud; dan

- b. Proses revisi MoU pengelolaan bandara sipil belum selesai sampai saat ini sehingga kegiatan pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh terbatas, maka perlu dilakukan percepatan dengan difasilitasi oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat.

8. Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*), sehingga perlunya dilakukan sosialisasi, diskusi serta memberikan motivasi pada masyarakat dalam perubahan perilaku menuju *pro-environment*; menyusun rencana aksi antisipasi perubahan iklim; serta melakukan mitigasi dan pemetaan daerah rawan bencana;

Program Lingkungan Hidup dalam rangka mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim dengan dilaksanakannya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan RTH, yang kegiatan antara lain: Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. Selain itu juga dilaksanakan Program Kampung Iklim (Proklam); Program Menuju Indonesai Hijau (MIH); pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi dan Perubahan Iklim Terpadu Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:185.45/339/KEP/421.013/2014; dan Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan didukung oleh GIZ dan Australian Government;

- b. Tuntutan konversi lahan dan adanya degradasi kualitas lingkungan, akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek ekologis, sekaligus

menjaga keseimbangan ekosistem, maka perlu upaya untuk mengurangi terjadinya penurunan kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan; dan Penerbitan regulasi untuk melindungi lahan pertanian produktif melalui Perda atau Perbup tentang LP2B;

- c. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dalam public services, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan mengoptimalkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan atau pelaku usaha;
- d. Karakter masyarakat yang beragam dan berada pada fase transisi antara kebiasaan hidup di perkotaan dan pedesaan, sehingga perlu upaya peningkatan kegiatan sosialisasi untuk memotivasi masyarakat dalam perubahan perilaku menuju *pro-environment* dan bantuan stimulan kemitraan untuk realisasi percepatan menuju perilaku dimaksud;
- e. Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang tergolong memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Dari aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Malang juga terus meningkat yakni rata-rata 0,5% per tahun. Sementara posisi wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, adanya percepatan pembangunan Lingkar Kota Malang, Kota Kepanjen, serta Malang Selatan seiring dengan dibukanya Jalan Lintas Selatan (JLS), maka pertumbuhan penduduk diperkirakan akan jauh lebih pesat sehingga potensi eksploitasi dan kerusakan SDA akan semakin tinggi, maka perlu dilaksanakan antara lain melalui program kemitraan/ kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sebagai salah satu misi dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; dan

- f. Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Malang masih belum dapat memenuhi baku mutu. Kualitas air badan air dipengaruhi oleh buangan limbah dari sektor domestik (perumahan/pemukiman) dan non domestik (limbah industri, pertambangan, pertanian, peternakan, rumah sakit, hotel dan kegiatan usaha kecil-menengah) dari hulu sampai ke hilir. Sementara pengawasan dan pemantauan yang dilakukan saat ini masih lebih difokuskan pada sektor industri, sehingga perlu mengoptimalkan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran termasuk penetapan regulasi yang berkaitan dengan penentuan dan pengeluaran izin lingkungan; menumbuhkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam kegiatan pengendalian pencemaran air di wilayah masing-masing; pembinaan, penindakan terhadap industri maupun sumber pencemar potensial lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga terjadi penurunan beban pencemar di lingkungan perairan wilayah Kabupaten Malang; dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pusat Pengelolaan Ekoregional Jawa dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta dinas/instansi yang terkait dengan kebijakan dan penerapan peraturan pengendalian pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Malang.

9. Urusan Pertanahan sebagai berikut:

- a. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan beberapa pemilik tanah tidak bersedia melepaskan tanah,

sehingga perlu mengoptimalkan pendekatan persuasif melalui pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat;

- b. Adanya penghentian proses perizinan di bidang kehutanan terkait tukar menukar kawasan hutan, sehingga perlu koordinasi yang intensif dengan kementerian dan instansi terkait untuk memantau perkembangan proses TMKH;
- c. Tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, sehingga perlu upaya koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi dan pihak-pihak terkait; dan
- d. Kurangnya perencanaan pengadaan tanah pada beberapa lokasi, sehingga perlu penyusunan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah secara bersamaan.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil:

- a. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang sulit dijangkau, sehingga diperlukan suatu teknologi dalam mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik dan penerbitan Akta kematian, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan; meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan keliling; dan melaksanakan sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Jasa Raharja, terutama pemanfaatan akte kematian sebagai syarat klaim asuransi.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Perlu ditingkatkan Capaian Realisasi RAD KLA, dengan melakukan percepatan capaian RAD KLA, Forum Anak dan Upaya Lintas Sektor menuju Kabupaten Malang Layak Anak dan GN AKSA;
- b. Perlunya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam Implementasi PUG sebagai strategi pembangunan, dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk menginternalisasi peran dan mengintegrasikan pug dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatannya;
- c. Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak, sehingga perlu data yang update dan sistematis yang semakin handal dan tersaji oleh Pusat Data Daerah (P2D);
- d. Jauhnya jangkauan kelompok perempuan dan kelompok rentan yang perlu mendapat penguatan, peningkatan keterampilan dan motivasi, sehingga perlu meningkatkan efektifitas serta memperluas jangkauan pembinaan kelompok perempuan dan kelompok rentan bekerjasama dengan jejaring; dan
- e. Embrio kelompok usaha ekonomi produktif perempuan perlu mendapat pelatihan keterampilan, motivasi, dan peralatan, sehingga perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB, sehingga perlu peningkatan kuantitas modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB; dan

- b. Masih rendahnya jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan masih tingginya *Unmet Need*, maka perlu meningkatkan konseling KB MKJP di masyarakat.

13. Sosial sebagai:

- a. Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level, sehingga perlu dilakukan optimalisasi kualitas pelayanan dan peningkatan koordinasi pada berbagai sektor dan level, serta melakukan pengajuan program/kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat.

14. Ketenagakerjaan

- a. Masih rendahnya kualitas SDM, sehingga perlu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada; dan
- b. Masih minimnya kesempatan kerja, sehingga perlu perluasan kesempatan kerja sektor informal di pedesaan/ perkotaan dilokasi kantong-kantong pengangguran.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal GLK, RMU dan rantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM, sehingga perlu dilakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan GLK, RMU dan rantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha, serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM;
- b. Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian, sehingga perlu dilakukan percepatan untuk mewujudkan kerjasama usaha diantaranya melalui pelaksanaan Bimtek bagi pengurus dan anggota Koperasi/ KUD yang bergerak dibidang peternakan dan pertanian;
- c. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi, sehingga perlu pengawasan dan pembinaan secara intensif pada koperasi yang memperoleh dana bergulir;
- d. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pendataan UKM dan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada, antara lain: pelatihan kewirausahaan dan konsultasi melalui Klinik KUKM berupa fasilitas pendampingan dan konsultasi bisnis bagi KUMKM dengan kegiatan pendampingan Advokasi, Pembiayaan, Pemasaran, pelatihan Konsultasi KUMKM (Permodalan, Pemasaran, TTG dan SDM UMKM); dan
- e. Kurangnya permodalan pada UPTD-PPK BLUD Dana Bergulir, sehingga realisasiajuan bantuan dana bergulir masih menunggu angsuran dari penerima modal bergulir, sehingga perlu upaya penambahan

modal bergulir bagi UPTD-PPK BLUD dan pengawasan yang intensif terhadap penerima dana bergulir.

16. Penanaman Modal:

- a. Masih kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif berkenaan dengan data dan informasi penanaman modal; dan
- b. Masih minimnya perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM, sehingga perlu upaya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

17. Kebudayaan

- a. Belum seluruh wilayah koordinator mempunyai paguyuban organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Malang, dari 7 eks pembantu bupati hanya wilayah eks Pembantu Bupati di Pujon yang memiliki Paguyuban Seni Budaya Malang Barat (MALABAR), sehingga perlu dibentuk paguyuban organisasi kesenian di setiap koordinator wilayah guna memudahkan koordinasi dan pengumpulan data;
- b. Keterbatasan sarana prasarana dinas pada urusan kebudayaan untuk mempermudah cakupan koordinasi maupun kegiatan pembinaan kepada kelompok seni budaya yang tersebar pada 33 kecamatan, sehingga perlu penambahan sarana prasarana kendaraan roda dua maupun roda empat;
- c. Para pelaku seni budaya juga mempunyai pekerjaan lain yang bervariasi, sehingga dalam kegiatan melestarikan budaya terkadang terkendala dengan urusan pekerjaan, apalagi bekerja di bidang seni budaya di rasa belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga perlu adanya pembinaan kegiatan ekonomis atau sebuah

lembaga (koperasi atau badan usaha) yang dikelola oleh sebuah komunitas seni budaya yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sekaligus perlu ada perhatian lebih dari Pemerintah Kab. Malang untuk memberikan bantuan stimultan kepada kelompok seni sebagaimana program bantuan hibah bidang seni budaya; dan

- d. Belum tersedianya sarana prasarana panggung (*amphitheater*) yang representatif untuk pertunjukan seni sekaligus menjamu pengunjung/tamu secara layak, sehingga perlu pembangunan sarana prasarana *amphitheater* yang representatif.

18. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Kurangnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah, sehingga perlu lebih intens sekolah dalam hal pembinaan/pelatihan kedisiplinan, khususnya baris berbaris, dan pemberian wawasan kebangsaan agar lebih memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme;
- b. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan, sehingga perlu lebih ditingkatkan upaya-upaya pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap pemuda potensi, agar lebih kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan prestasi dari hasil karya pemuda;
- c. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan semangat keolahragaan melalui sosialisasi yang lebih baik agar minat terhadap olahraga khususnya bagi penyandang cacat lebih banyak lagi; dan
- d. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia, sehingga perlu

menumbuhkan kepedulian masyarakat agar ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga yang ada.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Wilayah Kabupaten Malang yang luas merupakan kendala bagi Satpol PP dan Linmas karena dengan keterbatasan personil sulit dalam melakukan pemantauan secara maksimal, serta minimnya sarana untuk kegiatan penertiban khususnya pembongkaran, sehingga perlu penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perda yang ada di daerah, dan perlunya pengadaan sarana untuk kegiatan pembongkaran; dan
- b. Militansi dan fanatisme masyarakat terhadap agama, ideologi dan keyakinan yang kurang terbina dengan baik rentan terhadap munculnya faham radikal, serta terjadinya reaksi yang berlebihan dalam menanggapi kasus bernuansa SARA sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman kehidupan sosial masyarakat, maka perlu melakukan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan sikap toleransi dan rasa solidaritas di kalangan masyarakat melalui kegiatan pembinaan keagamaan, dialog secara intensif dengan ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh lintas agama, budayawan dan seniman, tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan, kalangan pers dan sebagainya.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Adanya penyerahan dan pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada desa atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan kesiapan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Kewenangan dan anggaran yang lebih besar dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien, sehingga perlu disiapkan kemampuan sumber daya manusia secara maksimal antara lain: melalui pelatihan dan bimbingan teknis; dan
- b. Belum diketahuinya implementasi kebijakan JKN-BPJS melalui perangkat regulasi daerah di Kab. Malang; Bagaimana kondisi faktual ketersediaan prasarana, tenaga medis, dan kesiapan produk/program layanan bagi pengguna BPJS; Bagaimana pemahaman, persepsi masyarakat tentang BPJS; serta Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pengguna BPJS dan aspirasi masyarakat berkenaan dengan implementasi BPJS di Kab. Malang, sehingga perlu dilakukannya Studi Persepsi Publik Tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan melalui BPJS di Kab. Malang.

21. Ketahanan Pangan

- a. Kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini khususnya adalah pupuk bersubsidi, harus terus menerus diawasi dan dievaluasi terkait pendistribusian dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu upaya untuk mengoptimalkan kegiatan monitoring di kecamatan-kecamatan sasaran, serta rapat evaluasi bersama produsen, distributor, pengecer, petugas lapangan dan perwakilan gapoktan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang; dan

- b. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai pendukung cadangan pangan di tingkat rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara optimal kepada masyarakat berkenaan manfaat dari kegiatan dimaksud.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemahaman aparatatur pemerintah desa dalam memahami undang-undang, sehingga perlu diadakannya diseminasi informasi bagi masyarakat desa dan pelatihan aparatatur pemerintahan desa; dan
- b. Belum memahaminya kelompok kerja profil desa tentang informasi dan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan guna meningkatkan pemahaman informasi dan teknologi.

23. Statistik

- a. Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu; hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu, sehingga kedepan diharapkan adanya perubahan tentang mekanisme/ sistem pengumpulan data pada tahun berjalan; dan
- b. Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS kabupaten dengan BPS provinsi, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang mantap dengan provinsi dalam hal data dan informasi.

24. Kearsipan

- a. Belum tersedianya tenaga arsiparis, sehingga perlu adanya tenaga fungsional arsiparis, guna menunjang pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan penataan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan;

- b. Dalam kegiatan dokumentasi terkendala dengan voltase listrik yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada alat cetak foto, yakni pada saat pencetakan dilakukan di lapangan, maka perlu menambah alat inveter dengan kapasitas yang cukup untuk cetak dengan dilengkapi *stabilizer* pada kendaraan operasional; dan
- c. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis.

25. Komunikasi dan Informatika

- a. Masih minimnya jumlah *telecentre* di Kabupaten Malang, sedangkan wilayah Kabupaten Malang cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya *telecentre* untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga perlu adanya penambahan *telecentre* di beberapa kecamatan yang potensial baik dari sisi SDM maupun potensi daerah yang dimilikinya; dan
- b. Belum semua desa di Kabupaten Malang terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*, sehingga perlu adanya pembangunan tower di lokasi tertentu yang tidak terjangkau jaringan internet.

26. Perpustakaan

- a. Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit, sehingga perlunya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), mengingat MPK sangat diperlukan untuk pelayanan dan sosialisasi utamanya difokuskan pada lembaga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta desa yang lokasinya jauh dari

- pusat kota, sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat di Kab. Malang; dan
- b. Masih terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi, sehingga perlu upaya penambahan koleksi buku melalui peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya baca.

27. Pertanian

- a. Pengembangan usaha peternakan rakyat yang jumlahnya kurang lebih 85% di wilayah Kabupaten Malang, sebagian sudah menimbulkan masalah pencemaran lingkungan terutama tentang bau kotoran. Untuk penertiban hal tersebut, khususnya tentang perizinan belum ada landasan hukum yang memadai. Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada masih mengatur perizinan usaha peternakan skala industri dengan populasi besar tertentu, sehingga perlu adanya landasan hukum yang relevan untuk mengatur tentang mekanisme Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR), selain itu perlu dilakukan sosialisasi teknis tentang higienitas dan sanitasi kandang untuk menghilangkan bau, serta pengelolaan limbah peternakan unggas; dan
- b. Adanya kecenderungan alih ungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, sehingga perlu upaya penekanan semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta melaksanakan kegiatan Indeks Pertamanan (IP 300).

28. Kehutanan

- a. Sesuai data dalam dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), di Kabupaten Malang terdapat lahan dengan tingkat erosi sangat berat, berat dan sedang seluas 116.057 ha. Luasnya lahan dengan tingkat erosi yang demikian akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012, Kabupaten Malang hanya mempunyai hutan rakyat seluas 43.956,92 ha. Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan juga semakin meningkat, sehingga terhadap permasalahan tersebut perlu upaya percepatan penanganan lahan kritis/potensial kritis, lahan terbuka maupun lahan kurang produktif;
- b. Permasalahan lain berkaitan dengan sumberdaya manusia, antara kelembagaan kelompok tani lahan kering, LKDPH dan kelompok aneka usaha kehutanan. Berdasarkan data yang ada, tercatat ada 530 kelompok tani lahan kering, 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan, sehingga perlu meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha bidang kehutanan, penanganan kawasan lindung, penguatan usaha ekonomi dan kelembagaan kelompok, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; dan
- c. Belum tersedia data informasi kehutanan yang memadai, baik data yang terkait dengan luar kawasan

maupun dalam kawasan hutan, maka perlu penyediaan data informasi kehutanan yang memadai untuk kepentingan internal dan para pihak.

29. Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- a. Wilayah Pertambangan (WP) di Kabupaten Malang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR-RI, sehingga perlu disosialisasikan kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam bidang pertambangan di Kabupaten Malang;
- b. Masih banyak penambangan liar yang mengambil sumber daya alam seperti pasir, batuan, tanah urug yang lokasinya jauh dipelosok/ pedalaman dan dekat dengan jembatan (kurang dari 100m), sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan, penertiban dan pembinaan secara intensif; dan
- c. Kurangnya personil ESDM khususnya inspektur tambang dan tenaga teknis tambang, sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan pertambangan, maka perlu dilakukan penambahan personel dan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan.

30. Pariwisata

- a. Sinergitas program kegiatan antar instansi terkait belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dilaksanakannya sinergitas program kegiatan secara terpadu dengan mengadakan rapat – rapat koordinasi secara terpadu; dan
- b. Masih belum terpadunya pengembangan sektor pariwisata sehingga cenderung pengembangan berjalan ditempat/ stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung, maka perlu sinergitas antar stakeholder

dalam menumbuh kembangkan sektor pariwisata melalui program kegiatan terpadu.

31. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih terdapat kegiatan *illegal and unregulated fishing* di pesisir, sehingga perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dengan Polair, Kamla dan Pokmaswas setempat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan perlu dilakukan pendataan potensi dan tingkat kerusakan lingkungan akibat illegal unregulated fishing;
- b. Produksi ikan nila khususnya pada budidaya di waduk mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana alam erupsi Gunung Kelud pada bulan Februari 2014 dan adanya musim kemarau panjang, sehingga perlu memacu alih usaha budidaya ikan di lokasi pasca dampak erupsi Gunung Kelud dengan kegiatan budidaya ikan lele di kolam terpal;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan teknis sesuai standar kompetensi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan;
- d. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal yang diakibatkan oleh masih banyaknya skala usaha yang bersifat tradisional serta pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah, sehingga perlu melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; dan
- e. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan-

pelatihan teknis sesuai standar kompetensi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan.

32. Perdagangan

- a. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya, sehingga perlu diusulkan kepada Kementerian Perdagangan RI untuk merevisi regulasi yang telah diterbitkan berkaitan dengan SKA (Surat Keterangan Asal) yang dulunya SKA dimaksud diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten/Kota yang merupakan alat pembinaan dan pengawasan yang untuk di patuhi oleh importir dan eksportir.

33. Perindustrian

- a. Aparat dan pelaku ekonomi, serta masyarakat belum seluruhnya mendapatkan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap para pelaku ekonomi khususnya pedagang eceran dan masyarakat agar memahami ketentuan perundangan di bidang cukai secara umum; dan
- b. Masih ada sebagian masyarakat belum memahami terhadap bahaya dari beredarnya rokok ilegal, sehingga perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang tentang bahaya rokok ilegal, karena pada prinsipnya cukai adalah barang yang diawasi dan dikendalikan.

34. Transmigrasi:

- a. Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran, sehingga perlu diupayakan pemberian pembekalan dan pelatihan kepada calon trasmigran;

- b. Menurunnya kuota calon transmigrasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan kerjasama dengan daerah penempatan calon transmigrasi.